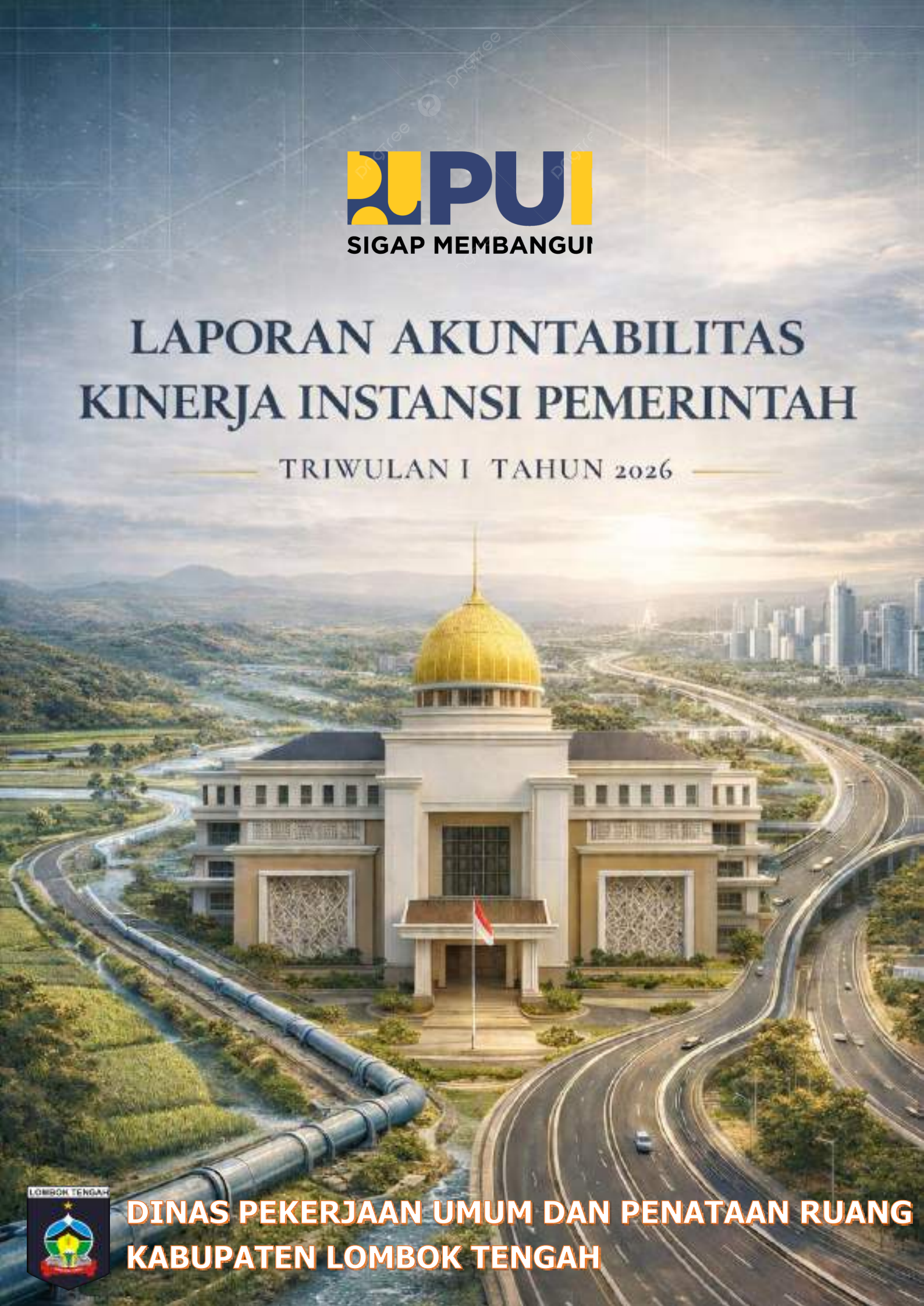
SIGAP MEMBANGUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN I TAHUN 2026



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihat, Segala Puji bagi Allah Ta'ala Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhamad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Amma ba'du.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Triwulan I Tahun 2026 merupakan satu dari komitmen konkret kami dalam menjalankan amanah pertanggungjawaban sebagai pelayan masyarakat perihal capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam lingkup Triwulan I (Januari s.d. Maret 2026) Tahun 2026. Laporan triwulanan ini juga menjadi sarana pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga langkah perbaikan dapat diambil lebih dini. Sebagaimana arah kebijakan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja, perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami.

"...perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami."

Dengan mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala pula, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya terbaik agar laporan ini selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan

realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumlah sentuhan perbaikan di masa yang akan datang. Betapa besar harapan kami, Laporan Kinerja ini menjadi informasi yang berimbang dan objektif terhadap capaian pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Akhir Kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

Praya, April 2026
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

THE MANDALIKA
Arita Lombok

BAB I
PENDAHULUAN



I.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
    1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis.

I.1.4 Tugas dan Fungsi

I.1.4.1 Kepala Dinas

A. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Fungsi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;
c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.2 Sekretariat

A. Tugas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Dinas;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas;
d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi terkait ;
i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

A. Tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyrakat dan perlengkapan;
c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
h. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;
i. Pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan barang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. Tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Lingkup Dinas.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
d. Pelaksanaan koordinasi peyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkup dinas;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan LKj-IP Dinas;
f. Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan petunjuk pelaksanaan tugas Dinas;
g. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
i. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
j. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang;
m. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
n. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
o. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;

THE MANDALIKA
Arita Lombok

p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;

q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air

A. Tugas

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Sumber Daya Air.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja dan Kegiatan Bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;

c. Pengkoordinasian Pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis dalam pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air;

d. Pengkoordinasian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;

e. Pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;

f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;

g. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;

h. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber daya air;

i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan rawa dan pantai;

j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;

THE MANDALIKA
Arita Lombok

k. Pendataan aset di Bidang Sumber Daya Air;
l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang Sumber Daya Air;
m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan Bidang Sumber Daya Air;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
o. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
p. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.6 Bidang Bina Marga

A. Tugas

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Bina Marga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
c. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian dan rekomendasi serta perencanaan teknis pembangunan bidang kebinamargaan;
d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis bidang kebinamargaan;
e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangannya;
f. Penyiapan rumusan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten dan desa;

THE MANDALIKA Arita Lombok

g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
h. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan Nasional;
i. Pengkoordinasian pendataan dan penginventarisir aset-aset jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
j. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan SOP dan SPM lingkup bidang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.7 Bidang Cipta Karya

A. Tugas

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Cipta Karyalingkup Bidang Cipta Karya.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan /bantuan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan;
d. penyusunan bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan gedung Negara;
f. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang keciptakaryaan;
g. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan bangunan gedung pemerintah;

THE MANDALIKA
Arita Lombok

h. Pengkoordinasian penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Cipta Karya;
j. Pelaksanaan penyusunan Rencana pengelolaan pengembangan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
l. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian pembangunan sistem pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
m. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal lingkup bidang;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

I.1.4.8 Bidang Penataan Ruang

A. Fungsi

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

I.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis

A. Tugas

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan penunjang tertentu.

B. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

I.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

I.2 DATA KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir Agustus 2025 sebanyak 185 orang dengan beberapa hal yang harus disesuaikan. Secara rinci data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

[Catatan penyusun: Register pegawai (Tabel 1.1) masih keadaan Agustus 2025, Tabel 1.2 keadaan Desember 2023, dan Gambar 1.1 berjudul Tahun 2025. Laporan Triwulan I Tahun 2026 belum memuat data kepegawaian 2026 dan mencatat bahwa jumlah pegawai aktif, distribusi per bidang/UPT, dan beban kerja perlu divalidasi (Bab III.1.6.4). Perbarui data tersebut sebelum dokumen final, lalu hapus catatan ini.]

Tabel 1.1 Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir. LALU RAHADIAN, M.Si	IV/c	01-10-2017	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06-09-2021	S2	Ilmu Pengelolaan SDA & Lingkungan
2	MUHAMMAD SARJAN, ST.MT.	IV/b	01-10-2023	Sekretaris Dinas	12-05-2023	S2	Mag. Perenc. Kota & Daerah
3	JALALUDIN, S.T., MT	IV/a	01-04-2022	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021	S2	Magister Teknik Sipil
4	ZULKIPLI, ST. MT.	IV/a	01-04-2023	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021	S.2	Teknik Pengairan
5	MUNAWARDI, ST.MT	IV/a	01-04-2024	Kabid Sumber Daya Air	07-01-2020	S2	Teknik Sipil
6	AMIR HAMZAH, S.T.	III/d	01-10-2011	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021	S1	Teknik Mesin
7	NURUL CHAERANI, S.T.	III/d	01-04-2012	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021	S1	Teknik Pengairan
8	SURAJE, ST.	III/d	01-10-2016	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021	S1	Tehnik Sipil
9	LALU AHADI, S.Sos.	III/d	01-04-2017	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan		S1	Ilmu Adm. Negara
10	MUHAMAD NASRI, ST.	III/d	01-04-2019	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	31-12-2021	S1	Teknik Arsitek
11	LALU MIRZA AMRULLOH, ST.	III/d	01-04-2020	Penguji Laboratorium Tanah Aspal dan Beton	01-02-2024	S1	Teknik Sipil
12	LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, ST	III/d	01-04-2021	Kepala UPT. Air Limbah Domestik	03-05-2024	S1	Teknik Sipil
13	EKANITA SOVIANTI, ST.M.Eng	III/d	01-04-2021	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021	S.2	Perencanaan Kota dan Daerah
14	AHMAD HALIFI, SE.	III/d	01-04-2021	Kasubbag. TU. UPT. Air Limbah Domestik	20-03-2024	S1	Ekonomi Pembangunan
15	ARIFUDIN NUR, ST. MSc	III/d	01-04-2022	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021	S2	Magister Sistem & Teknik Transportasi
16	MASSADRI ZULKARNAIN, ST. MT	III/d	01-04-2022	Kabid Bina Marga	07-01-2020	S2	Teknik Sipil

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
17	IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST. MT	III/d	01-04-2022	Kepala Bidang Cipta Karya	03-05-2024	S2	Pembangunan Wilayah dan Kota
18	EKO HANDI HANDOYO, S.T.	III/d	01-04-2022	Kepala UPT. Peralatan dan Pengujian	07-01-2020	S1	Teknik Mesin
19	LALU RUDY HERMAWAN, S.T. M.P.W.K	III/d	01-04-2022	Kepala Bidang Penataan Ruang	03-05-2024	S2	Teknik Pemb. Wil & Kota
20	ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.Ak	III/d	01-04-2022	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	03-05-2024	S2	Akuntansi Pemerintahan
21	TODY AULIYA, S.T.	III/d	01-04-2022	Perencana Ahli Pertama	01-02-2024	S1	Teknik Perenc. Wil & Kota
22	R. DWIONO EKO PRASETYO, ST.	III/d	01-04-2023	Analis Sumber Daya Air	07-01-2020	S1	Teknik Sipil
23	BAIQ ERNAWATI, SE.	III/c	01-10-2021	Kasubag TU UPT. Jasa Konstruksi	03-05-2024	S1	Ekonomi Pembangunan
24	BUYUNG SASAKA ARPAN, ST.	III/c	01-10-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil
25	PAIMAN, S.Adm	III/c	01-04-2022	Pengolah Sarana dan Prasrana Pengairan Jonggat)		S1	Ilmu Adm. Negara
26	BUDIMAN, ST	III/c	01-04-2024	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil
27	MUSTIAJI	III/b	01-04-2012	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		STM	Otomotif
28	BAIQ FITRIAH	III/b	01-04-2015	Bendahara Pengeluaran Pembantu		SMA	Ilmu-ilmu Fisik
29	LALU AZIS FARHAN	III/b	01-04-2018	Pemelihara Jalan		STM	Bangunan
30	LALU ANDI AHMAD SUPRIADI	III/b	01-04-2018	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	30-12-2021	SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
31	KASPUL HADI, S. Adm.	III/b	01-10-2020	Pengelola Pemeliharaan Jalan		S1	Ilmu Adm. Negara
32	SRI SURIANTINI, ST.	III/b	01-10-2020	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan		S1	Teknik Mesin
33	LALU RAHMAN	III/b	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
34	HENDRAWAN SOEKRATES	III/b	01-04-2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu	01-01-2024	STM	Bangunan
35	BAIQ RINA RAHMAWATI, SE	III/b	01-04-2022	Bendahara/Bendahara Pengeluaran		S1	Ekonomi Pembangunan
36	ZIBAN BAKHTIAR, A.Md.	III/b	01-04-2021	Pengelola DAta		D. III	Teknik Mesin
37	LALU ARYA SUGITA, ST	III/b	01-04-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil
38	SATRIAWANGSA , S.AP	III/b	01-04-2021	Sub. Bagian TU UPT Peralatan & Pengujian		S1	Ilmu Adm. Negara
39	KAMIL, SH	III/b	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Wil. Janapria)		S1	Ilmu-Ilmu Sosial
40	BAIQ ERNAWATI, S.Sos	III/b	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		S1	IPS
41	MAHENDRA SUGANDHI, ST	III/b	01-04-2023	Pengawas Jaringaan Utilitas		S1	Teknik Sipil
42	MAYA GITA PERTIWI, ST	III/b	01-04-2023	Analis Tata Ruang		S1	Teknik Sipil
43	MUHAMAD REDWAN, S.Adm	III/b	01-10-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		S1	Bahasa
44	FATIMATUZZAHRAH, SE	III/b	01-04-2024	Pengelola Administrasi Keuangan		SMK	Akuntansi
45	BAIQ RUKYATILWATI, SE	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
46	BURHAN, S.Adm	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SPP	Pertanian & Pemb.
47	JAPARUDIN	III/a	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		SMU	IPS

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
48	ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002	S1	Perencana Wilayah dan Kota
49	ARIEF MUNANDAR, ST	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002	S1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
50	CAHYU RIESTYA VINANDA, S.P.W.K	III/a	01-03-2022	Analis Tata Ruang	01-03-2002	S1	Perencana Wilayah dan Kota
51	LALU MOCHAMAD HARISTA WIBAWA, ST	III/a	01-03-2022	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
52	LALU NATA TRESNA HADI, ST	III/a	01-03-2022	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002	S1	Arsitektur
53	NASRUL HASBY, ST	III/a	01-03-2022	Analis Sumber Daya Air	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
54	NURMAN EKA PRANATA, ST	III/a	01-03-2022	Analis Sumber Daya Air	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
55	VIVIN NOVITA NINGSIH, ST	III/a	01-03-2022	Pengawas Jalan dan Jembatan	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
56	LALU ARIF SUSBANDI, S.Adm	III/a	01-04-2022	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		S1	Akuntansi
57	BAHARUDIN	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
58	SUKAMTO	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Batukliang & Batukliang Utara)		SMEA	Perdagangan
59	AWALUDDIN	III/a	01-04-2023	Pemelihara Peralatan		SMA	IPS
60	MANSYUR, S.Adm	III/a	01-04-2023	sekertaris/Ajudan		S1	Ilmu Adm. Negara
61	SAHNAN	III/a	01-04-2023	Pengelola Data		STM	Bangunan
62	LALU MUHAMAD ALI	III/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan		STM	Bangunan
63	NASIP	III/a	01-04-2023	Petuga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)		STM	Bangunan
64	KISWARA	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)		STM	Bangunan
65	LALU RAIS ASHARI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		SMA	IPS
66	SAPRUN	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Praya & Jonggat)		STM	Bangunan
67	LALU SYAMSUL ANWAR	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
68	HIRMAYADI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Kepegawaian		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
69	AMRILLAH, ST	III/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan		S1	Teknik Sipil
70	SARII	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Ai(DI Jonggat)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
71	LALU HIRJAN, ST	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi umum		STM	Bangunan
72	MUHAMAD MULIAMIN	III/a	01-04-2023	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Tengah)		SMEA	Perkantoran
73	ARJAWI	III/	01-04-	Petugas Operasi		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
		a	2023	dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Mujur II)			
74	SRI HARTINI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
75	SRI ARTATI	III/a	01-04-2023	Bendahara Pengeluaran Pembantu		SMA A.3	IPS
76	M. HUSNI AMRI	III/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
77	EVI FEBRIANTY	III/a	01-04-2023	Bendahara Pengeluaran Pembantu		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
78	LALU AGUS PUTRA	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Kepegawaian		SMU	IPS
79	JASWADI	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Wilayah Praya Timur)		SMA	IPS
80	SUARMAN	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA	IPA
81	EROWAN	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		SMA	IPA
82	JASMUNI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA	IPA
83	SYAHRUDDIN	III/a	01-04-2023	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Barat Daya)		SMA	IPS
84	ALI SADIKIN	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		STM	Bangunan
85	RAHMAT	III/a	01-04-2023	Pengelola Sampel pengujian		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
86	LALU RIZAL AHMADI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum (UPT. Jasa Konstruksi)		SMA	Ilmu-ilmu Fisik
87	SUHERMAN	III/a	01-04-2023	Pengemudi		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
88	SUPARDI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
89	SLAMET SUPARDI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA A.3	IPS
90	SUJATMI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Keuangan		SMA A.2	Biologi
91	LALU SAIFUL BAHRI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
92	MANGKU BUANA SARDI, S.Adm	III/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air (BPY 2 Bunkate)		S1	Ilmu Adm. Negara
93	BADARUDIN, ST	III/a	01-10-2023	Pengelola Data		S1	Teknik Sipil
94	DITYA EDWIN EKAYANA, S.Sos	III/a	01-10-2023	Pemelihara Jalan		S1	Ilmu Ilmu Sosial
95	SABRI	III/a	01-10-2023	Pengadministrasi Keuangan		SMA	Paket C
96	MAAD ADNAN	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Renggung Hulu		MA	Ilmu-Ilmu Agama
97	MUHAMAD JABIR	III/a	01-04-2024	pengadministraasi umum		SMA A.4	Bahasa

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
98	RAHMAN ABDANI	III/a	01-04-2024	Pengelola Sampel Pengujian		STM	Bangunan
99	MOHAMAD ERWAN	III/a	01-04-2024	Penjaga Pintu Air		SMA A.3	IPS
100	AWALUDIN	III/a	01-04-2024	Pengelola Data		STM	Bangunan
101	SAMSURIYANI	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
102	LALU PITRAJAYA	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.4	Bahasa
103	LALU ASMAYADI	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
104	LALU MISBAN	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		MA	IPS
105	LALU RONI SATRIA	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA A.4	Bahasa
106	JAZARI AHMAD	III/a	01-04-2024	Operator Alat Berat		SMA A.3	IPS
107	DWI ARIYANTI IWANA	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum		STM	Bangunan
108	LINDA SARI	III/a	01-04-2024	Pengelola Kepegawaian		SMA	IPA
109	LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL	III/a	01-04-2024	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		SMA A2	Biologi
110	LALU MUJMAN	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		MA	IPS
111	LALU AGUS ADNAN	III/a	01-04-2024	Operator Alat Berat		SMA A.3	IPS
112	LALU ISHAK	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA A.3	IPS
113	MUHAMAD ANDRIAN	III/a	01-04-2024	pengadministraasi umum		STM	Bangunan
114	MUHAMAD NASIR	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum (Sekretariat)		SLTA UMUM	IPA
115	MUNADI	III/a	01-08-2024	Pengadministrasi Umum		STM	Bangunan
116	SYAMSURRIJAL	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)		MA A.3	IPS
117	DEDY ZULKARNAIN	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
118	LALU TANAURAN	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
119	RUSDI	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SMA A.2	Biologi
120	BAIQ NUR ASIAH	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	IPS
121	LALU FATHUL HIDAYAT	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
122	LALU SUYATNO	II/d	01-04-2021	Teknisi Keciptakaryaan		SMK	Bangunan
123	MASKAM	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	sMA
124	RUPLAN	II/d	01-04-2021	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		MA	IPS
125	SYAFI ' I	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMK	Pariwisata
126	MUHAMAD MANAN	II/d	01-04-2021	Pengeloa Sampel Pengujian		SMEA	Perdagangan
127	FATHUR	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
128	ABDUL HAPIZ	II/d	01-04-2021	Pemeliharaan Jalan		STM	Bangunan
129	UYUL MARTA DITIA ATMAJA	II/d	01-04-2022	Penjaga Pintu Air		SMU	IPA
130	M. NUR HIDAYAT	II/d	01-04-2022	Penjaga Pintu Air		SMU	IPS
131	INDRA EKAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS
132	KURNIATI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS
133	ROSMAYATI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS
134	SULISTIANINGSIH	II/d	01-04-2022	Pengolah daftar Gaji		MA	
135	BAIQ SRI ULAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
136	HIDAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
137	BAIQ REHANA	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMEA	Perdagangan
138	BAIQ NILIWATI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		MA	
139	LALU IMAM SUMAWI	II/d	01-04-2022	Pemelihara Jalan		SMU	IPS
140	IDAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
141	HIJRIAH	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMK	
142	LALU JUNAEDI	II/d	01-04-2022	Pengelola Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
143	KUSNAWIJAYA	II/d	01-10-2022	Pemelihara JAlan		STM	Bangunan
144	KABUL	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air		SMA.A2	Biologi
145	JAHRI	II/c	01-10-2020	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		Paket C	
146	NONOK IRHAM	II/c	01-10-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA.A2	Biologi
147	SUPARDI	II/c	01-10-2020	Pengadministrasi Umum		Paket C	
148	I KETUT BUDAYA ADNYANA	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air		Paket C	
149	MUHAMAD HAMIRI	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		MA	Ilmu-Ilmu Agama
150	MUHAMAD PAIZAN	II/c	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	01-01-2022	SMA	IPS
151	AKHMAD C	II/c	01-04-2021	Penjaga Pintu Air		Paket B	
152	MAHSUN	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		STM	Bangunan
153	NISPURWADI	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS
154	KETUT WIJAYA KUSUMA, A.Md	II/c	01-03-2022	Pengelola Sumber Daya Air		D-III	Teknik Sipil
155	LALU MUHAMAD ZAELANI	II/c	01-10-2022	Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
156	LALU BUDI HERMAWAN	II/c	01-10-2022	Teknisi Gedung/Bangunan		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
157	AKHIMUDIN	II/c	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SMP	
158	LALU SUHAIDI	II/c	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	Ilmu-ilmu Fisik
159	RAMDAN	II/c	01-04-2023	Penjaga Pintu Air (DAM Bunut Batukliang)		SMA	Pengetahuan Budaya
160	MINARIM	II/c	01-10-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMP	
161	KHAIRIL ANWAR	II/c	01-10-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan		SMP	

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
				Sumber Daya Air			
162	HAYIN	II/c	01-04-2024	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		PAKET C	
163	LALU ZULKIFLI	II/c	01-04-2024	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		SLTP	
164	BAIQ SRI RAHAYUNINGSIH	II/c	01-04-2024	Pramu Kebersihan		SLTP	
165	MANSUR BUDIAKA	II/c	01-04-2024	Operator Alat Berat		Paket C	
166	SASIH	II/c	01-04-2024	Penjaga Pintu Air		Paket C	
167	ABDUL AZIS	II/b	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SLTP	
168	AHMAD BADAWI	II/b	01-10-2021	Operator Alat Berat		Paket C	
169	ROMI IRWANTO	II/b	01-04-2021	Penjaga Kantor		SLTP	
170	QORIMAH	II/b	01-04-2024	Pengadministrasi Persuratan		Paket C	
171	WAHYU HIDAYAT	II/b	01-04-2024	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	
172	MARZUKI	II/a	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		paket C	
173	SAHRI	II/a	01-04-2023	Operator Alat Berat		SD	
174	LALU ISHAK	II/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SD	
175	I WAYAN PUJIARTA	II/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan		Paket B	
176	MAHISUN	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SD	
177	RAMDAN	II/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SMP	
178	LALU MAKMUN	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMP	
179	JUMAAH	II/a	01-04-2023	Operator Alat Berat		SD	
180	NURIDIN	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SD	
181	MASRIK	II/a	01-04-2024	Penjaga Pintu Air		SD	
182	LALU ANWAR	I/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SD	
183	AWALUDIN	I/d	01-04-2022	Penjaga Kantor		SD	
184	SUMARDAN	I/c	01-04-2021	Penjaga Kantor		SD	
185	HUSEN	I/c	01-10-2022	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SD	

Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan
(Keadaan Per Desember 2023)

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON :	
	a. II.a	1
	b. III.a	1
	c. III.b	4
	d. IV.a	2
	e. IV.b	2
2.	JABATAN FUNGSIONAL :	
	a. Perencana Ahli Pertama	1
	b. Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	2
	c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1
	d. Teknik Pengairan Ahli Muda	3
	e. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	2
	f. Penata Ruang Ahli Muda	2
3.	PANGKAT/GOLONGAN :	
	a. Pembina (Golongan IV)	5
	b. Penata (Golongan III)	105
	c. Pengatur (Golongan II)	88
	d. Juru (Golongan I)	6
4.	JENJANG PENDIDIKAN :	
	a. S3	0
	b. S2	12
	c. S1/D.IV	48
	d. Sarjana Muda/D.I/D.II/D.II	2
	e. SMA sederajat	117
	f. SLTP Sederajat	14
	g. SD Sederajat	11

I.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

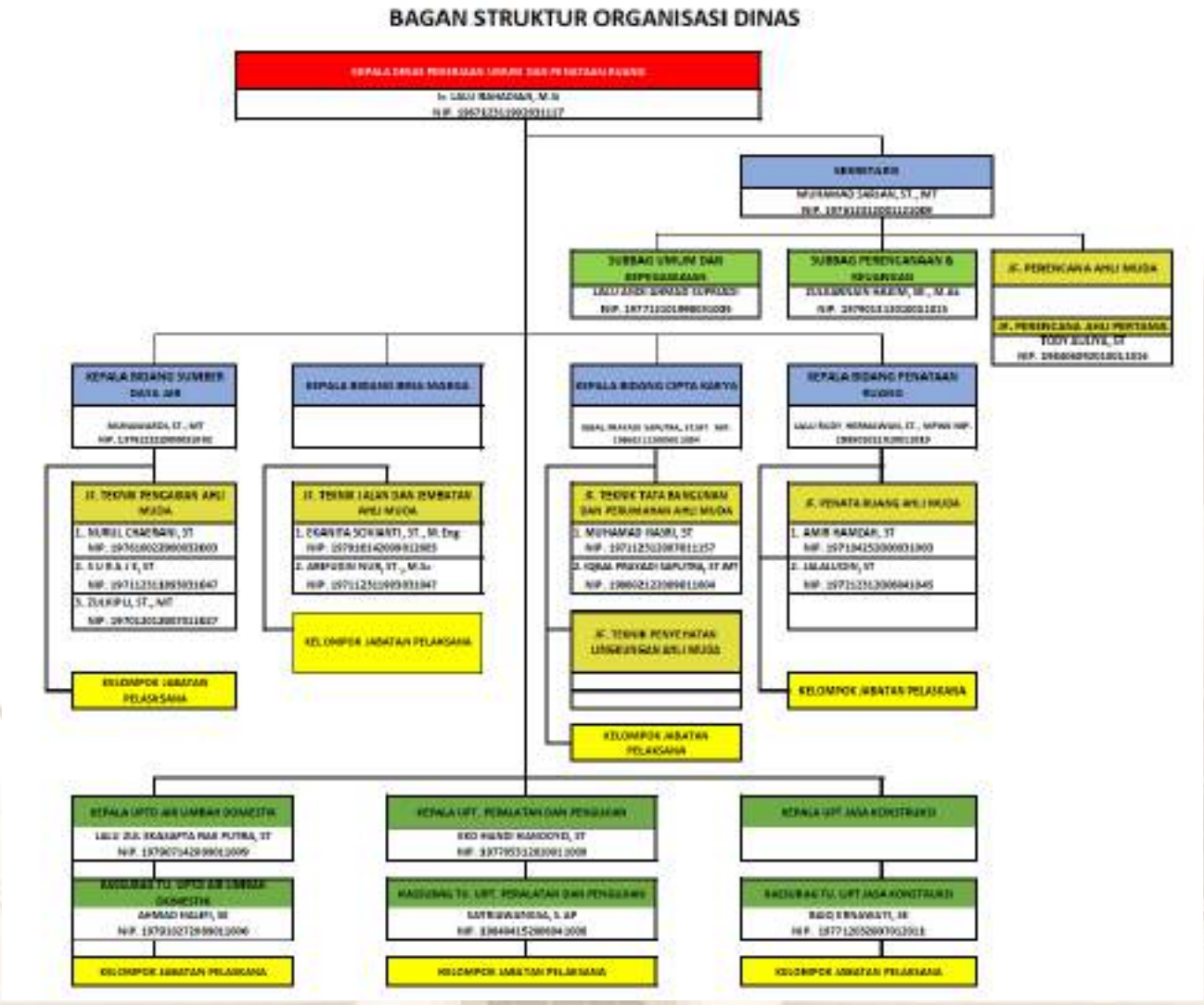
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. Unit Pelaksana Teknis.





Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I.4.1 Aspek Strategis

I.4.1.1 Visi

Berdasarkan Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025), peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah terhadap Visi Bupati “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (MASMIRAH)” dijalankan melalui Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Penataan Ruang. Dinas diharapkan menjadi motor penggerak pemerataan

pembangunan kewilayahan dan akses layanan dasar melalui infrastruktur yang berkualitas.

I.4.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah menempuh Misi 2 (dua) dan Misi 4 (empat) pembangunan daerah, yakni sebagai berikut:

1. Misi 2 (dua) “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau.”
2. Misi 4 (empat) “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah.”

Misi 2 (dua) menekankan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik. Misi 4 (empat) menekankan infrastruktur yang berkualitas dan seimbang antarwilayah, melalui konektivitas antarwilayah, jaringan jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan penataan ruang yang menjangkau perdesaan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, dan penataan ruang agar infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui: perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum Serta pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7. tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

I.4.1.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Visi, Misi Bupati terpilih dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

3. Program Pengelolaan SDA
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Selain program tersebut, PK 2026 memuat tiga program yang tidak beranggaran pada 2026, yaitu Program Drainase, Program Permukiman, dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.

I.4.2 Isu Strategis Utama

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang dicantumkan di Renja DPUPR, ditambah temuan perencanaan dan pelaksanaan pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Isu Strategis Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang	Isu Utama	Pengaruh Perubahan Regulasi
Sumber Daya Air (SDA)	- Rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi	- Perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dapat mempengaruhi prioritas dan alokasi anggaran untuk proyek irigasi. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang pengelolaan sumber daya air dapat berdampak pada program irigasi di tingkat daerah.
Bina Marga	- Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan kritis (belum mantap) - Kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, dan terminal	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jalan. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pembangunan jalan.
Cipta Karya	- Rendahnya cakupan pelayanan air minum - Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah - Masih terdapat rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan - Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung.

Bidang	Isu Utama	Pengaruh Perubahan Regulasi
Penataan Ruang	- Fungsi pengendalian dan penataan ruang yang belum konsisten - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang - Belum optimalnya pemanfaatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam mengendalikan fungsi tata ruang - Belum optimalnya pemanfaatan lahan, terutama pada lahan kritis	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang.
Sekretariat dan Umum	- Masih terdapat kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya yang belum optimal	- Perubahan regulasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat mempengaruhi kebijakan internal dan program DPUPR. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang kesetaraan gender dapat berdampak pada program dan kebijakan internal DPUPR untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan infrastruktur.
Lintas Bidang (Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan)	- Pagu Renja (Rp128,64 miliar) melampaui anggaran riil pada PK 2026 (Rp65,53 miliar) - Serapan program konstruksi (Jalan, SDA, SPAM, SPALD) hampir nol pada Triwulan I - Seri target Indeks Infrastruktur belum seragam, dan komponen Konektivitas, Internet, serta Listrik belum memiliki pemilik data pada PK - RTRW/RDTR dan RISPAM masih menunggu pembahasan lintas sektor	- Penyelarasan Renja, PK, dan DPA mengikuti plafon anggaran yang ditetapkan; penetapan SK Metodologi Indikator Kinerja menentukan seri target yang dipakai pada PK dan Renstra.

Sumber: Renja DPUPR, Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, dan data olahan


THE MANDALIKA
Arita Lombok

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



II.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahunan) yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Jangka Menengah, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran Mutu Tahunan selama 5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) akan membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai tuntutan. Disamping itu Rencana Strategis (Renstra) akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan aktifitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara menyeluruh. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program dan kegiatan.[1]

II.1.1 Visi[2]

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025), ditetapkan visi dan misi pembangunan daerah sesuai visi kepala daerah dan

[1] Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
[2] Renstra DPUPR Tahun 2025 - 2029

wakil kepala daerah terpilih yang selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Visi Kabupaten Lombok Tengah:

"Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (MASMIRAH)"

Dalam mendukung visi tersebut, DPUPR berperan terutama pada pilar Sejahtera, yaitu akses memadai terhadap layanan dasar melalui pemerataan pembangunan kewilayahan. Dukungan yang diberikan berupa infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan penataan ruang. RPJMD menjabarkan visi tersebut ke dalam lima misi, dan DPUPR terkait langsung dengan Misi 4 serta Misi 2.

II.1.2 Misi[3]

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJMD 2025–2029 menetapkan Misi sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas

Misi 1 memprioritaskan investasi di sektor pendidikan dan program kesehatan berbasis komunitas agar tercipta generasi yang berpengetahuan luas serta memiliki fisik dan mental yang kuat.

Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau

Misi 2 meningkatkan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, menyediakan pusat layanan terpadu, dan meningkatkan profesionalisme ASN. Sasaran yang terkait langsung dengan Dinas adalah Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (S.2.1.1), dengan indikator Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah.

Misi 3 : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi 3 mendorong sinergi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, kebijakan insentif investasi, pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis budaya lokal, serta penguatan resiliensi terhadap bencana.

Misi 4 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah

Misi 4 mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan seimbang antarwilayah, tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan tetapi menjangkau perdesaan, melalui

[3] Renstra DPUPR Tahun 2025 - 2029

pengembangan transportasi yang menghubungkan desa dengan kota serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik, dan air bersih.

Tujuan T.4.1, Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan, diukur dengan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Indeks Desa, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran S.4.1.1, Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah, diukur dengan Indeks Infrastruktur dan Rasio Konektivitas.

Outcome yang menjadi kewenangan Dinas meliputi akses masyarakat terhadap irigasi, aksesibilitas jalan yang nyaman dan aman, kualitas sistem drainase perkotaan, dan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Misi 5 : Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Misi 5 melestarikan nilai budaya luhur melalui pelatihan seni budaya lokal, penguatan lembaga adat, kegiatan gotong royong, dan pendidikan karakter.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Misi 4 (Tujuan T.4.1 dan Sasaran S.4.1.1) serta Misi 2 (Sasaran S.2.1.1), dengan program prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada RPJMD 2025–2029.

II.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

II.1.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lombok Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Dinas Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam Renstra periode 2025–2029 menetapkan 1 Tujuan dengan 3 Sasaran yang diukur

melalui 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menjadi dasar pengukuran kinerja Tahun 2026 termasuk laporan Triwulan I, yakni:

Tabel 2.1 Tujuan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET 2026 (PK)	TARGET 2026 (RPJMD)	TARGET 2029 (RPJMD)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T.1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	I.T.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), poin	PK; RPJMD (T.4.1)	Kepala Dinas	52,68	58,98	68,47

II.1.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi program/kegiatan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET 2026 (PK)	TARGET 2026 (RPJMD)	TARGET 2029 (RPJMD)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	I.S.1	Indeks Infrastruktur, poin	PK; RPJMD (S.4.1.1)	Kepala Dinas	60,89	58,55	65,86
S.1.2	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	I.S.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	PK	Kepala Dinas	100	–	–
S.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	I.S.3	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, poin	PK; hasil evaluasi Inspektorat	Kepala Dinas	73,04	–	–

Sumber: PK 2026 Revisi 1 dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029 (Perda Nomor 4 Tahun 2025). Target RPJMD adalah target tingkat daerah; tanda – berarti indikator tingkat perangkat daerah tidak dimuat pada RPJMD. RPJMD memuat Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah (2026: 77,06; 2029: 84,14) yang berbeda tingkat dengan IKU Dinas. Target PK untuk IKLI dan Indeks Infrastruktur berbeda dari RPJMD dan SK Metodologi (IKLI 53,91; Indeks Infrastruktur 63,33), sehingga perlu diselaraskan.

II.2 RENCANA KERJA/KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok tengah Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Pagu pada Renja 2026 sebesar Rp128,64 miliar, sedangkan anggaran riil pada PK 2026 Revisi 1 sebesar Rp65,53 miliar, dan pagu indikatif RPJMD 2026 untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp149,60 miliar. Selisih Rp63,10 miliar antara Renja dan PK ini merupakan temuan perencanaan yang dibahas pada Bab III dan ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi Renja–PK–DPA. Karena Renja belum memuat target triwulanan, target tahunan dipakai sebagai pembanding pada laporan Triwulan I.

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6	7
T.1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	I.T.1	IKLI	PK 2026 Revisi 1	Kepala Dinas	52,68
S.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	I.S.1	Indeks Infrastruktur	PK 2026 Revisi 1	Kepala Dinas	60,89
S.1.2	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	I.S.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Tabel IKU; PK	Kepala Dinas	100
S.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	I.S.3	Nilai Implementasi SAKIP PD	Hasil evaluasi Inspektorat	Kepala Dinas	73,04

Sumber: PK 2026 Revisi 1 dan Renja 2026. SK Metodologi Indikator Kinerja memuat seri target berbeda untuk IKLI (53,91) dan Indeks Infrastruktur (63,33)

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU), atau *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu, dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan[4].

Tujuan utama dari IKU adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (*improvement activities*);
2. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
3. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

[4] Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2022

IKU DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 mengacu pada Renstra 2025–2029, PK 2026, dan SK Metodologi Indikator Kinerja. Empat IKU dilaporkan per triwulan dan tahunan, yaitu IKLI (I.T.1), Indeks Infrastruktur Berbobot (I.S.1), Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (I.S.2), dan Nilai Implementasi SAKIP PD (I.S.3). Daftar IKU disajikan dalam Lampiran.

II.3.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

Instansi	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Tugas	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerinntahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Fungsi	:	a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas; b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas; c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas; e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara; g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Tujuan	:	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas
Indikator Tujuan	:	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5 Rincian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS/FORMULA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	IKLI (I.T.1)	Indeks berbasis survei (skala 0–100) dengan faktor konversi 2/3 yang bersifat asumsi, menurut SK Metodologi Indikator Kinerja. Semakin tinggi semakin baik. Realisasi triwulan dibandingkan langsung dengan target tahunan 2026 (52,68, PK Revisi 1) karena target triwulanan tidak ditetapkan terpisah. Basis hitung dan dokumen hitung Triwulan I perlu diverifikasi.	Tabel IKU Triwulan I; SK Metodologi

II.3.2 Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

Instansi	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tugas	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerinntahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Fungsi	:	a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas; b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas; c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas; e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara; g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Tujuan	:	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas
Indikator Tujuan	:	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Sasaran	:	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 2. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Infrastruktur Berbobot 2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 3. Nilai Implementasi SAKIP PD

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS/FORMULA	SUMBER DATA
1	2	3	4
S.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Berbobot (I.S.1)	Indeks komposit tujuh komponen berbobot (jalan, irigasi, air minum, sanitasi, konektivitas, internet, dan listrik) menurut SK Metodologi Indikator Kinerja, skala 0–100; semakin tinggi semakin baik. Bobot terbesar: Air Minum 0,27, Sanitasi 0,22, dan Irigasi 0,16. Nilai komponen Triwulan I belum tersedia.	SK Metodologi Indikator Kinerja; Tabel IKU Triwulan I
S.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (I.S.2)	(Jumlah KKPR yang diterbitkan sesuai RTR ÷ jumlah total KKPR yang diterbitkan) × 100%. Indikator ini menggambarkan kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. KKPR ditetapkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik (UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 21 Tahun 2021, dan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021). Berkas Renja Triwulan I mencatat 162 layanan KKPR; jumlah yang sesuai RTR belum tercantum.	Tabel IKU Triwulan I; PK
S.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP PD (I.S.3)	Hasil evaluasi resmi SAKIP oleh Inspektorat (skala 0–100); tidak direkalkulasi internal dan tidak berubah antartriwulan sampai evaluasi berikutnya (SK Metodologi).	Hasil evaluasi Inspektorat; SK Metodologi

II.4 PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 (REVISI 1)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia[5].

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian kinerja Tahun 2026 merupakan tahun kedua Renstra 2025–2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja Tahun 2026 mencerminkan kemajuan menuju target akhir Renstra. Laporan Triwulan I memakai PK 2026 Revisi 1 sebagai sumber anggaran riil, yang diverifikasi sebagian dengan DPA 2026. Adapun Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 (Revisi 1) disajikan dalam Lampiran.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 (Revisi 1)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	52,68 (indeks)
1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	60,89 (poin)
1.2	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100%
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,04 (poin)

[5] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen formal antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil (result-based management). Dokumen ini memuat sasaran strategis dan sasaran program beserta indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun 2026, PK disesuaikan melalui Revisi 1 yang menjadi rujukan anggaran riil pada laporan Triwulan I.

A. SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas

   Tujuan ini menjadi payung bagi intervensi infrastruktur dan penataan ruang DPUPR pada periode Renstra 2025–2029.

   Komitmen ini diukur melalui:

   - Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 2026 sebesar 52,68 (PK Revisi 1; SK Metodologi memuat 53,91) dan target RPJMD 2029 sebesar 68,47 (target 2026 RPJMD 58,98); indeks berbasis survei dengan faktor konversi 2/3 yang bersifat asumsi.

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

   Sasaran ini diwujudkan melalui program Jalan, Sumber Daya Air, SPAM, Air Limbah, dan Penataan Bangunan Gedung.

   Komitmen ini diukur melalui:

   - Indeks Infrastruktur Berbobot dengan target 2026 sebesar 60,89 (PK Revisi 1; SK Metodologi memuat 63,33) dan target RPJMD 2029 sebesar 65,86 (target 2026 RPJMD 58,55).

3. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan

   Sasaran ini diwujudkan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu layanan KKPR, penetapan RTRW/RDTR, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

   Komitmen ini diukur melalui:

   - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan target 100% pada 2026 dan target akhir Renstra; RPJMD tidak memuat indikator ini.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

   Sasaran ini didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, antara lain perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan administrasi.

   Komitmen ini diukur melalui:

- Nilai Implementasi SAKIP PD dengan target 2026 sebesar 73,04. SK Metodologi memuat target 80,12 untuk 2030, sedangkan RPJMD tidak memuat target SAKIP perangkat daerah.

B. SASARAN PROGRAM

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, program yang dianggarkan pada PK 2026 Revisi 1 beserta indikator outcome, target 2026, dan pagu adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Indikator: Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%); target 2026 100,00
   - Pagu PK: Rp22.940.166.863
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   - Indikator: Persentase Kondisi Irigasi Kab/Kota (%); target 2026 88,69
   - Pagu PK: Rp2.755.824.162
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   - Indikator: Ketahanan Air – RT akses air minum layak (%); target 2026 95,81
   - Indikator: RT akses air minum SPAM perpipaan/non-perpipaan terlindungi (%); target 2026 81,32
   - Pagu PK: Rp4.986.825.000
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   - Indikator: RT akses air limbah domestik aman (%); target 2026 88,93
   - Indikator: RT akses sanitasi aman (%); target 2026 4,47
   - Pagu PK: Rp2.291.839.610
5. Program Penataan Bangunan Gedung
   - Indikator: Kepatuhan PBG dan SLF (%); target 2026 100,00
   - Indikator: Bangunan Gedung kondisi baik (%); target 2026 100,00
   - Indikator: Konsumsi listrik per kapita (kWh), target RPJMD; target 2026 374,69
   - Indikator: Fasilitas pemda ber-EBT (%), target RPJMD; target 2026 1,51
   - Pagu PK: Rp4.601.326.160
6. Program Penyelenggaraan Jalan
   - Indikator: Tingkat Kemantapan Jalan (%); target 2026 76,79
   - Pagu PK: Rp27.609.777.563
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   - Indikator: Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%), target RPJMD; target 2026 21,57
   - Pagu PK: Rp33.975.220

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Indikator: Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%); target 2026 100,00
- Pagu PK: Rp314.723.000

Total pagu PK 2026 Revisi 1 sebesar Rp65.534.457.578. Program Drainase (Cakupan Drainase kondisi baik, target 21,46%), Permukiman (Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik, target 100%), dan Penataan Bangunan dan Lingkungan (target 100%) tidak beranggaran pada 2026 menurut PK. Target indikator outcome program mengikuti PK 2026 Revisi 1, kecuali yang ditandai target RPJMD, yang bersumber dari RPJMD 2025–2029 (Perda Nomor 4 Tahun 2025).

II.4.1 Indikator Program dan Keluaran Sekretariat

Penanggung jawab: Sekretaris Dinas, Muhamad Sarjan, S.T., M.T.; Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Lalu Andi Ahmad Supriadi. Sumber: PK 2026 Revisi 1.

Tabel 2.9 Indikator Program dan Keluaran Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2026	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemda	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	100	PK Sekretaris Dinas; pagu Rp22.940.166.863
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	PK Kasubag Perencanaan dan Keuangan; pagu Rp225.302.538
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	PK
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	PK
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	PK
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	PK
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	PK
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	PK
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1 berita acara	PK
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	117 orang/bulan	PK Kasubag Perencanaan dan Keuangan; pagu Rp15.658.207.091
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	2 laporan	PK
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 laporan	PK
13	Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	PK Kasubag Umum dan Kepegawaian; pagu Rp3.324.900

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2026	Keterangan
14	Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	PK; pagu Rp9.480.000
15	Administrasi Umum	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	PK; pagu Rp136.879.000
16	Administrasi Umum	Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	1 dokumen	PK
17	Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	PK; pagu Rp3.630.040.000
18	Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 laporan	PK; pagu Rp2.760.154.080
19	Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	PK
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	64 unit	PK; pagu Rp516.779.254
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	8 unit	PK

II.4.2 Indikator Program dan Keluaran Bidang Bina Marga

Penanggung jawab: Sekretaris Dinas selaku penanggung jawab Bina Marga, Muhamad Sarjan, S.T., M.T.

Tabel 2.10 Indikator Program dan Keluaran Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2026	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	76,786	Target PK; pagu Rp27.609.777.563
2	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan direkonstruksi (km)	16	Target tahunan Renja
3	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan diganti (m)	150	Target tahunan Renja
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan dipelihara rutin (km)	10	Target tahunan Renja
5	Survei Kondisi Jalan dan Jembatan	Panjang jalan disurvei (km)	500	Target tahunan Renja

II.4.3 Indikator Program dan Keluaran Bidang Sumber Daya Air

Penanggung jawab: Kepala Bidang Sumber Daya Air, Munawardi, S.T., M.T.

Tabel 2.11 Indikator Program dan Keluaran Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2026	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota (%)	88,69	Target PK; pagu Rp2.755.824.162
2	Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	Panjang jaringan irigasi direhabilitasi (km)	28,5	Target tahunan Renja
3	Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	Panjang jaringan irigasi ditingkatkan (km)	31,67	Target tahunan Renja
4	Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	Panjang jaringan irigasi dioperasikan dan dipelihara (km)	26,4	Target tahunan Renja

II.4.4 Indikator Program dan Keluaran Bidang Cipta Karya

Penanggung jawab: Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.

Tabel 2.12 Indikator Program dan Keluaran Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2026	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Ketahanan Air – RT yang memiliki akses layanan sumber air minum layak (%)	95,81	Target PK; pagu Rp4.986.825.000
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RT dengan akses air minum SPAM perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi (%)	81,32	Target PK
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Sambungan rumah (SR)	1.000	Target tahunan Renja
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RT yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman (%)	88,93	Target PK; pagu Rp2.291.839.610
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RT dengan akses sanitasi aman (%)	4,47	Target PK
6	Pembangunan SPALD Berbasis Masyarakat	Kapasitas terbangun (m^3/hari)	100	Target tahunan Renja
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kepatuhan PBG dan SLF Kab/Kota (%)	100	Target PK; pagu Rp4.601.326.160
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik (%)	100	Target PK
9	Program Penataan Bangunan Gedung	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	374,69	Outcome menurut RPJMD
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT (%)	1,51	Outcome menurut RPJMD
11	Penerbitan PBG/SLF	Dokumen PBG/SLF (dokumen)	120	Target tahunan Renja
12	Pemeliharaan dan Pemeriksaan Berkala Gedung Strategis	Bangunan gedung strategis dipelihara (bangunan)	1	Target tahunan Renja

II.4.5 Indikator Program dan Keluaran Bidang Penataan Ruang

Penanggung jawab: Kepala Bidang Penataan Ruang, Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.

Tabel 2.13 Indikator Program dan Keluaran Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2026	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Kab/Kota (%)	100	Target PK; pagu Rp314.723.000
2	Pelaksanaan KKPR	Layanan KKPR (layanan)	300	Target tahunan Renja
3	Penetapan RTRW	Perda RTRW (dokumen)	1	Target tahunan Renja
4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Temuan kasus indikasi pelanggaran (kasus)	2	Target 2026

II.4.6 Indikator Program dan Keluaran UPTD

Penanggung jawab: Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian, Eko Handi Handoyo, S.T.; Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, Lalu Zul Ekasapta Rak Putra, S.T.; Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Jasa Konstruksi, Baiq Ernawati, S.E. (jabatan Kepala UPTD Jasa Konstruksi tidak terisi). Sumber: PK 2026 Revisi 1.

Tabel 2.14 Indikator Program dan Keluaran UPTD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2026	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UPTD Jasa Konstruksi – Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi kualifikasi operator, teknisi, atau analis yang dilatih	50 orang	Target PK; pagu Rp33.975.220
2	UPTD Peralatan dan Pengujian – Pemeliharaan Alat Besar	Alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	8 unit	Target PK; pagu Rp300.950.274
3	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik – Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja	1.000 rumah tangga	Target PK; pagu Rp10.859.610

II.4.7 Program Tanpa Pagu pada PK 2026

Tabel 2.15 Program Tanpa Pagu pada PK 2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Program	Indikator Outcome	Target 2026	Pagu PK
1	2	3	4	5
1	Program Drainase	Cakupan Drainase kondisi baik (%)	21,46	Rp0
2	Program Permukiman	Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik (%)	100,00	Rp0
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100,00	Rp0

Sumber: PK 2026 Revisi 1 dan RPJMD 2025–2029. Program ini tidak memiliki data realisasi Triwulan I.

II.4.8 Perbandingan Pagu PK dengan Pagu Indikatif RPJMD

Tabel 2.16 Perbandingan Pagu Program PK 2026 Revisi 1 dengan Pagu Indikatif RPJMD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No	Program	Pagu Indikatif RPJMD 2026	Pagu PK Revisi 1	Selisih	PK terhadap RPJMD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp29.488.306.000	Rp22.940.166.863	-Rp6.548.139.137	77,8%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp7.091.247.000	Rp2.755.824.162	-Rp4.335.422.838	38,9%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp13.662.195.000	Rp4.986.825.000	-Rp8.675.370.000	36,5%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp2.805.129.000	Rp2.291.839.610	-Rp513.289.390	81,7%
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp1.515.616.000	Rp0	-Rp1.515.616.000	0,0%
6	Program Pengembangan Permukiman	Rp7.113.236.000	Rp0	-Rp7.113.236.000	0,0%
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp27.105.687.000	Rp4.601.326.160	-Rp22.504.360.840	17,0%
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp2.200.000.000	Rp0	-Rp2.200.000.000	0,0%

No	Program	Pagu Indikatif RPJMD 2026	Pagu PK Revisi 1	Selisih	PK terhadap RPJMD
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp57.757.392.000	Rp27.609.777.563	-Rp30.147.614.437	47,8%
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp101.343.000	Rp33.975.220	-Rp67.367.780	33,5%
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp757.300.000	Rp314.723.000	-Rp442.577.000	41,6%
	Jumlah	Rp149.597.451.000	Rp65.534.457.578	-Rp84.062.993.422	43,8%

Sumber: RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029 (Perda Nomor 4 Tahun 2025), tabel target dan pagu indikatif urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; PK 2026 Revisi 1. Pagu indikatif RPJMD 2026 untuk urusan ini berjumlah Rp149.597.451.000.

II.5 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kinerja suatu organisasi, terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan Renstra (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kerja Tahunan), dan Perjanjian Kinerja. Berikut adalah hubungan dan keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut.

1. Rencana Strategis (Renstra)
   a. Renstra adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang merinci visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi untuk beberapa tahun ke depan (biasanya dalam rentang 3-5 tahun).
   b. Renstra memberikan arah strategis bagi organisasi dan menentukan fokus utama yang harus dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
   a. RKT merupakan dokumen perencanaan operasional yang dihasilkan berdasarkan Renstra. RKT merinci kegiatan-kegiatan spesifik, target, dan alokasi sumber daya untuk satu tahun tertentu.
   b. RKT harus selaras dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga pelaksanaan kegiatan tahunan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.
3. Perjanjian Kinerja
   a. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang mengikat antara pimpinan unit kerja atau individu dengan atasan atau pihak yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.

b. Perjanjian Kinerja sebaiknya mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi yang tercantum dalam Renstra dan RKT. Oleh karena itu, perjanjian kinerja seharusnya memperkuat pelaksanaan RKT dan, secara lebih luas, mencapai tujuan jangka panjang yang terdapat dalam Renstra.

Keterkaitannya ketiga dokumen perencanaan kinerja itu terhubungkan oleh pola sebagai berikut.

a. Renstra memberikan landasan strategis untuk RKT dan perjanjian kinerja. RKT dikembangkan berdasarkan Renstra, dan perjanjian kinerja seharusnya mencerminkan target dan prioritas yang ditetapkan dalam RKT.
b. RKT dan perjanjian kinerja bersifat lebih operasional dan spesifik dibandingkan Renstra, tetapi konsistensi antara ketiganya harus dijaga untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif.

Dengan menjaga keterkaitan yang baik antara Renstra, RKT, dan perjanjian kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tingkat perencanaan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa sumber daya dan usaha fokus pada hal-hal yang benar-benar strategis dan relevan. Laporan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan perlunya menjaga keselarasan ini: pagu Renja (Rp128,64 miliar) melampaui anggaran riil pada PK (Rp65,53 miliar), sehingga serapan dibaca terhadap pagu PK dengan pagu Renja sebagai pembanding. Target Renstra dan PK seharusnya menjabarkan target RPJMD 2025–2029 (Perda Nomor 4 Tahun 2025); pada 2026 target IKLI pada PK (52,68) lebih rendah daripada RPJMD (58,98), sehingga penyelarasannya perlu dijelaskan.



Gambar 2.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja
DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



Bab ini menyajikan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah untuk periode Januari–Maret 2026.

Sumber data dan kedudukannya. (1) Realisasi fisik dan keuangan: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD (Triwulan I 2026). (2) Anggaran riil: Perjanjian Kinerja (PK) 2026 Revisi 1, diverifikasi sebagian dengan DPA 2026; pagu Renja ditampilkan sebagai pembanding untuk melihat simpangan antara perencanaan Renja dan anggaran yang ditetapkan. (3) Target IKU: SK Metodologi Indikator Kinerja (untuk Indeks Infrastruktur) serta PK dan Renstra (untuk IKU lain dan penanggung jawab). (4) Tabel realisasi IKU Triwulan I 2026; IKU diukur per triwulan dan tahunan. (5) Laporan Monev dan Matriks Pemantauan, hanya sebagai informasi lanjutan Triwulan II–III (tidak dicampur dengan Triwulan I). Data yang belum tersedia tidak dianalisis dan ditulis sebagai keterbatasan.

III.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pengukuran kinerja Triwulan I 2026 mengacu pada PK 2026, Renstra 2025–2030, SK Metodologi, Renja, dan DPA. Empat IKU dilaporkan per triwulan dan tahun: IKLI (I.T.1), Indeks Infrastruktur (I.S.1), Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (I.S.2), dan Nilai Implementasi SAKIP (I.S.3). Realisasi fisik dan keuangan bersumber dari Cetakan Evaluasi Renja.

Capaian dihitung dengan Capaian = Realisasi ÷ Target × 100% untuk indikator yang semakin tinggi semakin baik. Karena keempat IKU berupa indeks atau persentase level, realisasi triwulan dibandingkan langsung dengan target tahunan 2026. Kategori memakai skala Perbup 84/2024 pada laporan 2025: ≤50% Sangat Rendah; 51–65% Rendah; 66–75% Sedang; 76–90% Tinggi; >91% Sangat Tinggi.

Evaluasi Triwulan I berfungsi sebagai pengendalian dini agar program, kegiatan, dan anggaran tetap pada jalur sasaran tahunan dan jangka menengah.

Pekerjaan konstruksi bertumpu pada perencanaan, pengadaan, dan kontrak di awal tahun, sehingga kemajuan fisik 25% pada Triwulan I tidak dijadikan patokan. Keluaran dinilai terhadap target tahunan sampai target triwulanan per paket ditetapkan.



III.1.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPR Triwulan I Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian thd Target Triwulan I	Capaian thd Target Tahunan	Status Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	T.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	IKLI (I.T.1)	Indeks (0–100)	53,91	Tidak ditetapkan terpisah	65,70	121,87%	121,87%	Sangat Tinggi; basis hitung perlu dipastikan (V6)	Tabel IKU Tw I; PK; SK
2	S.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Berbobot (I.S.1)	Poin (0–100)	63,33 (SK)	Tidak ditetapkan terpisah	61,89	97,73%	97,73%	Sangat Tinggi menurut skala, tetapi kurang 1,44 poin dari target 2026. Bila memakai seri PK/Renstra (58,55): 105,70%	Tabel IKU Tw I; SK Metodologi
3	S.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (I.S.2)	%	100	Tidak ditetapkan terpisah	100	100%	100%	Sangat Tinggi	Tabel IKU Tw I; PK
4	S.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP PD (I.S.3)	Poin (0–100)	73,04	Tidak ditetapkan terpisah	72	98,58%	98,58%	Sangat Tinggi menurut skala, tetapi target 2026 belum terpenuhi (kurang 1,04 poin)	Tabel IKU Tw I; PK

Rumus: Capaian = Realisasi Tw I ÷ Target 2026 × 100%. Target triwulanan tidak ditetapkan terpisah; pada indikator level, realisasi triwulan dibandingkan dengan target tahunan.

IKLI. Realisasi 65,70 adalah 121,87% target 2026 (53,91) dan 101,45% target 2030 (64,76). Kenaikan dari baseline 52,68 adalah 13,02 poin, jauh di atas kenaikan 2024–2025 (+1,03) dan kenaikan rencana 2026 (+1,23). SK Metodologi menjelaskan IKLI berbasis survei dengan faktor konversi 2/3 yang bersifat asumsi. Karena pekerjaan konstruksi belum menghasilkan keluaran pada Triwulan I (lihat III.1.6), kenaikan ini tidak dapat dikaitkan dengan program dan lebih mungkin berasal dari basis hitung. Tindakan: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memverifikasi dokumen hitung pada Triwulan II.

Indeks Infrastruktur (Berbobot). Realisasi 61,89 adalah 97,73% target 2026 (63,33) dan 83,32% target 2030 (74,28), sehingga sisa capaian 12,39 poin. Kenaikan dari baseline SK (60,89) hanya 1,00 poin, sementara rencana 2026 menambah 2,44 poin. Menurut komponen pada SK, kenaikan rencana 2026 terutama berasal dari Konektivitas (±1,04 poin, 43% dari total), Irigasi (±0,59 poin, 24%), Air Minum (±0,25 poin), Sanitasi (±0,21 poin), Jalan (±0,20 poin), dan Internet (±0,15 poin). PK Eselon III memuat indikator untuk jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi, tetapi tidak memuat indikator konektivitas, internet, atau listrik. Pada seri PK/Renstra, realisasi yang sama setara 105,70% target 2026 (58,55); perbedaan ini adalah perbedaan seri target, bukan kinerja.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Realisasi 100% sama dengan target 2026 dan 2030, dengan rumus KKPR sesuai RTR ÷ total KKPR diterbitkan. Berkas Renja mencatat 162 layanan KKPR pada Triwulan I dari target tahunan 300 layanan (54%); jumlah yang sesuai RTR tidak tercantum. Risiko jangka panjang adalah RTRW/RDTR yang belum ditetapkan (keluaran 0 dokumen pada Triwulan I).

Nilai Implementasi SAKIP. Realisasi 72 adalah 98,58% target 2026 (73,04) dan 89,87% target 2030 (80,12). Nilai ini adalah hasil evaluasi resmi Inspektorat dan tidak direkalkulasi internal (SK Metodologi), sehingga tidak berubah antartriwulan sampai evaluasi berikutnya. Nilai naik 5,16 poin dari 2024 (66,84). Kegiatan pendukung, yaitu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, telah menghasilkan 1 laporan (target tahunan 1) dengan realisasi Rp750.000 dari Rp168.310.000 pagu Renja (0,45%); manfaatnya terhadap nilai SAKIP belum dapat dibuktikan.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.4 Capaian Indikator Outcome Program Triwulan I Tahun 2026 (Renja)

No.	Program	Indikator Outcome	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi Tw I 2026	Capaian thd Target 2026	Status Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	25,00	25,00%	Kemajuan kumulatif; belum dapat dinilai	Indikator kemajuan pelaksanaan, bukan formula.
2	Program SDA	Persentase Kondisi Irigasi Kab/Kota (%)	88,69	95,12	89,53	100,95%	Sangat Tinggi (sementara)	Lebih rendah dari 2025 (95,12).
3	Program SPAM	Ketahanan Air – RT akses air minum layak (%)	95,81	97,09	97,09	101,34%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan realisasi 2025 (V7).
4	Program SPAM	RT akses air minum SPAM perpipaan/non-perpipaan terlindungi (%)	81,32	80,59	80,59	99,10%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan realisasi 2025 (V7).
5	Program Air Limbah	RT akses air limbah domestik aman (%)	88,93	88,18	88,18	99,16%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan realisasi 2025 (V7).
6	Program Air Limbah	RT akses sanitasi aman (%)	4,47	3,10	3,19	71,36%	Sedang (sementara)	Lebih tinggi dari 2025 (3,10); perlu verifikasi.
7	Program Drainase	Cakupan Drainase kondisi baik (%)	21,46	20,15	0,00	Belum dapat dihitung	Belum ada data	Nilai Tw I 0; program berpagu Rp0 atau tanpa pengukuran.
8	Program Permukiman	Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik (%)	100,00	97,00	0,00	Belum dapat dihitung	Belum ada data	Nilai Tw I 0; program berpagu Rp0 atau tanpa pengukuran.
9	Program Gedung	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	374,69	284,75	284,75	76,00%	Sedang (sementara)	Sama dengan realisasi 2025 (V7). PK: di luar kendali langsung Bidang Cipta Karya (V13).
10	Program Gedung	Kepatuhan PBG dan SLF (%)	100,00	85,91	100,00	100,00%	Sangat Tinggi (sementara)	Lebih tinggi dari 2025 (85,91); perlu verifikasi.
11	Program Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT (%)	1,51	0,70	0,70	46,36%	Sangat Rendah (sementara)	Sama dengan realisasi 2025 (V7). PK: di luar kendali langsung Bidang Cipta Karya (V13).
12	Program Gedung	Bangunan Gedung kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan realisasi 2025 (V7).
13	Program Penataan B&L	Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan realisasi 2025 (V7).
14	Program Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	76,79	76,88	76,87	100,11%	Sangat Tinggi (sementara)	Lebih rendah dari 2025 (76,88).
15	Program Jasa Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	21,57	20,90	0,00	Belum dapat dihitung	Belum ada data	Nilai Tw I 0; program berpagu Rp0 atau tanpa pengukuran.
16	Program Penataan Ruang	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	100,00	100,00	25,00	25,00%	Kemajuan kumulatif; belum dapat dinilai	Indikator kemajuan pelaksanaan, bukan formula.

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD Tw I 2026. Status memakai skala Perbup 84/2024 terhadap target tahunan; "sementara" karena nilai identik dengan 2025.

Dari 11 indikator berformula, 6 berada pada atau di atas target 2026 (irigasi, air minum layak, PBG/SLF, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, kemantapan jalan) dan 5 berada di bawahnya. Lima indikator identik dengan realisasi 2025 sehingga lebih tepat dibaca sebagai nilai tahun sebelumnya. Yang paling tertinggal adalah RT akses sanitasi aman (71,36% target 2026), fasilitas pemda ber-EBT (46,36%), dan konsumsi listrik per kapita (76,00%); dua yang terakhir di luar kendali langsung Bidang Cipta Karya menurut PK. Drainase, Permukiman, dan Tenaga Kerja Konstruksi Ahli tidak memiliki data Triwulan I. Capaian pada tabel ini adalah hasil perhitungan indikator, dibedakan dari persentase kemajuan kegiatan pada III.1.6.

III.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Data pembanding adalah baseline 2024–2025 dari Renstra/PK dan baseline SK untuk Indeks Infrastruktur. Data Triwulan I 2025 dan 2021–2023 tidak tersedia. Set indikator 2026 berbeda dari laporan 2025 (Indeks Infrastruktur Wilayah 72,46, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang, Indeks Konektivitas), sehingga angka Bab III 2025 tidak dibandingkan.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Triwulan I 2026 dengan 2024 dan 2025

Indikator	2024	2025	Tw I 2026	Δ 2024→2025	Δ 2025→Tw I 2026	Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
IKLI	-	-	65,70	+1,03	+13,02	Naik; lonjakan 2026 perlu validasi (V6)
Indeks Infrastruktur (basis SK)	–	60,89	61,89	–	+1,00	Naik tipis; 2024 tidak tersedia pada basis SK
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	100	100	100	0,00	0,00	Stabil pada target
Nilai Implementasi SAKIP	66,84	72,00	72,00	+5,16	0,00	Tidak berubah; nilai resmi tahunan

Sumber: Renstra Tabel 4.7 dan PK 2026 (2024–2025), SK Metodologi, tabel IKU Tw I 2026. Seri Renstra untuk Indeks Infrastruktur (55,45 → 56,35) tidak dipakai (V4).

Kenaikan IKLI sekitar 1 poin per tahun pada 2024–2025 berubah menjadi 13,02 poin pada Triwulan I 2026, sedangkan Indeks Infrastruktur naik 1,00 poin dari baseline SK. Kenaikan SAKIP 5,16 poin terjadi pada 2025 dan tertahan pada 2026 sampai evaluasi berikutnya. Karena hanya ada dua titik historis, tren belum dapat ditetapkan, dan penyebab kenaikan tidak dapat dibuktikan dari sumber.

Pada indikator outcome program, hanya Kondisi Irigasi yang menurun dari 2025 (95,12 menjadi 89,53; −5,59 poin), dan sumber tidak menjelaskan penyebabnya. Indikator lain sama atau naik tanpa keluaran konstruksi yang dapat dikaitkan.

III.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Rumus: Selisih = Realisasi − Target akhir; Persentase = Realisasi ÷ Target akhir × 100%; Sisa capaian = Target akhir − Realisasi bila positif. Persentase bukan peluang keberhasilan. Aturan risiko: (a) Rendah bila realisasi ≥95% target 2026 dan kesenjangan ke 2030 ≤5%; (b) Sedang bila realisasi ≥95% target 2026 dan kesenjangan >5% sampai 15%; (c) Tinggi bila realisasi <95% target 2026 atau kesenjangan >15%; (d) naik satu tingkat bila kenaikan tahunan yang dibutuhkan melebihi rata-rata kenaikan jalur target; (e) Kritis bila indikator tidak berpagu atau tanpa data 2026.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Terakhir dengan Target Akhir Renstra (2030)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama/Outcome	Realisasi Terakhir (Tw I 2026)	Target Akhir Renstra 2030	Selisih thd Target Akhir	% thd Target Akhir	Sisa Capaian	Status Pencapaian	Tingkat Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	T.1 Akses Infrastruktur Berkualitas	IKLI	65,70	64,76	+0,94	101,45%	0,00	Tercapai (sementara)	Rendah	Terlampaui; risiko pada validitas basis hitung. Strategi: mempertahankan capaian dan memverifikasi data.
2	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Berbobot (seri SK)	61,89	74,28	−12,39	83,32%	12,39	Belum tercapai	Tinggi	Kesenjangan 16,7% target; kebutuhan 3,10 poin/tahun melampaui jalur SK 2,74 poin/tahun.
3	S.1.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100	100	0,00	100%	0,00	Tercapai	Rendah	Pemeliharaan capaian; RTRW/RDTR belum ditetapkan.
4	S.1.3 Akuntabilitas Kinerja	Nilai Implementasi SAKIP	72	80,12	−8,12	89,87%	8,12	Belum tercapai	Tinggi	Kebutuhan 2,03 poin/tahun melampaui rata-rata jalur 1,77; target 2026 (73,04) belum terpenuhi.
5	Program Penunjang	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	25,00	100,00	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Sedang	Kemajuan kumulatif; target Tw I belum ada.
6	Program SDA	Persentase Kondisi Irigasi Kab/Kota (%)	89,53	100,00	-10,47	89,53%	10,47	Belum tercapai	Sedang	Gap 10,47 poin; turun 5,59 poin dari 2025; kebutuhan 2,62/tahun vs jalur 2,83.
7	Program SPAM	Ketahanan Air – RT akses air minum layak (%)	97,09	98,93	-1,84	98,14%	1,84	Belum tercapai	Rendah	Gap 1,84 poin; nilai sama dengan 2025.
8	Program SPAM	RT akses air minum SPAM perpipaan/non-perpipaan terlindungi (%)	80,59	84,24	-3,65	95,67%	3,65	Belum tercapai	Rendah	Gap 3,65 poin; nilai sama dengan 2025.
9	Program Air Limbah	RT akses air limbah domestik aman (%)	88,18	91,93	-3,75	95,92%	3,75	Belum tercapai	Rendah	Gap 3,75 poin; nilai sama dengan 2025.
10	Program Air Limbah	RT akses sanitasi aman (%)	3,19	12,52	-9,33	25,48%	9,33	Belum tercapai	Tinggi	71,36% target 2026; kebutuhan 2,33/tahun vs jalur 2,01.
11	Program Drainase	Cakupan Drainase kondisi baik (%)	Tidak ada data	23,15	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Kritis	Program tidak beranggaran 2026 (PK); tidak ada data.
12	Program Permukiman	Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik (%)	Tidak ada data	100,00	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Kritis	Program tidak beranggaran 2026 (PK); tidak ada data.
13	Program Gedung	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	284,75	435,17	-150,42	65,43%	150,42	Belum tercapai	Tinggi	76,00% target 2026; kebutuhan 37,61/tahun vs jalur 15,12. Di luar kendali langsung (PK).
14	Program Gedung	Kepatuhan PBG dan SLF (%)	100,00	100,00	+0,00	100,00%	0,00	Tercapai (sementara)	Rendah	Capaian 100%; loncatan dari 85,91 (2025) perlu verifikasi.
15	Program Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT (%)	0,70	6,26	-5,56	11,18%	5,56	Belum tercapai	Tinggi	46,36% target 2026; kebutuhan 1,39/tahun vs jalur 1,19. Di luar kendali langsung (PK).
16	Program Gedung	Bangunan Gedung kondisi baik (%)	100,00	100,00	+0,00	100,00%	0,00	Tercapai (sementara)	Rendah	Pemeliharaan capaian 100%.
17	Program Penataan B&L	Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100,00	100,00	+0,00	100,00%	0,00	Tercapai (sementara)	Sedang	Capaian 100% tetapi program tidak beranggaran 2026 (PK).
18	Program Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	76,87	81,17	-4,30	94,71%	4,30	Belum tercapai	Sedang	Gap 4,30 poin (5,3%); anggaran Jalan belum terserap; kebutuhan 1,07/tahun vs jalur 1,10.
19	Program Jasa Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	Tidak ada data	25,25	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Tinggi	Tidak ada data Tw I; target 2026 (21,57) di atas realisasi 2025 (20,90).
20	Program Penataan Ruang	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	25,00	100,00	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Sedang	Kemajuan kumulatif; 6 kasus terdeteksi vs target 2026 sebanyak 2.

Sumber: tabel IKU Tw I 2026; SK Metodologi (target Indeks Infrastruktur); PK dan Renstra; Cetakan Evaluasi RENJA SKPD. Baris 1–4 adalah IKU; baris 5–20 adalah outcome program. Semua indikator "semakin tinggi" semakin baik".

Analisis. (1) Jarak: IKLI dan Kesesuaian sudah berada pada atau di atas target 2030; Indeks Infrastruktur dan SAKIP masih 12,39 dan 8,12 poin di bawah target akhir. (2) Tren: dua titik historis belum cukup menetapkan tren. (3) Sisa waktu: empat tahun (2027–2030). (4) Kenaikan dibutuhkan: 3,10 dan 2,03 poin per tahun. (5) Kelayakan: bergantung pada keluaran yang terbukti, dan pada Triwulan I keluaran konstruksi hampir nol. (6) Risiko: Indeks Infrastruktur dan SAKIP Tinggi. (7) Implikasi: Renja 2027 perlu mengaitkan komponen indeks, terutama Konektivitas, Irigasi, dan Air Minum, dengan program berpagu.

Untuk IKLI dan Kesesuaian, strategi bergeser ke mempertahankan capaian: menjaga kualitas data survei, menuntaskan RTRW/RDTR, dan menjaga ketepatan layanan KKPR. Untuk indikator yang tertinggal, besaran kesenjangan dan kenaikan per tahun dibahas pada III.1.4.

III.1.4 Analisis Proyeksi Pencapaian Indikator sampai Akhir Periode Renstra

Data historis hanya dua titik (2024 dan 2025) ditambah Triwulan I 2026, sehingga proyeksi numerik berbasis median atau rata-rata perubahan tahunan belum dapat dipertanggungjawabkan. Tabel menyajikan (a) skenario konservatif: nilai tetap pada realisasi terakhir; (b) skenario moderat: kenaikan minimum per tahun agar tepat mencapai target 2030, dibandingkan dengan jalur target; (c) skenario optimistis tidak diangkakan karena laju terbaik yang konsisten belum teridentifikasi. Ini perhitungan kebutuhan, bukan prediksi.

Tabel 3.7 Analisis Proyeksi Pencapaian Indikator sampai Akhir Periode Renstra

No.	Indikator	Realisasi Terakhir	Target Akhir Renstra	Sisa Capaian	Tren Historis	Skenario Konservatif	Skenario Moderat	Skenario Optimistis	Tingkat Risiko	Dasar Proyeksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IKLI	65,70	64,76	0,00	51,65 → 52,68 → 65,70	Tetap di 65,70; target 2030 terpenuhi	Tidak perlu kenaikan; fokus mempertahankan	-	Rendah	Aritmetika; basis hitung perlu dipastikan
2	Indeks Infrastruktur (seri SK)	61,89	74,28	12,39	60,89 → 61,89 (2025 → Tw I)	Tetap di 61,89; kesenjangan 12,39 tidak tertutup	≥3,10/tahun (2027–2030); jalur SK 2,74/tahun	-	Tinggi	Aritmetika kebutuhan dan jalur SK
3	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	100	100	0,00	100 → 100 → 100	Tetap 100	Tetap 100	-	Rendah	Target pemeliharaan
4	Nilai Implementasi SAKIP	72	80,12	8,12	66,84 → 72 → 72	Tetap di 72; kesenjangan 8,12	≥2,03/tahun; jalur Renstra 1,77/tahun	-	Tinggi	Aritmetika kebutuhan dan jalur Renstra
5	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	76,87	81,166	4,30	76,88 → 76,87	Tetap di 76,87; kesenjangan 4,30	≥1,07/tahun; jalur 1,10/tahun	-	Sedang	Aritmetika; data Renja Tw I
6	Kondisi Irigasi (%)	89,53	100	10,47	95,12 → 89,53	Tetap di 89,53; kesenjangan 10,47	≥2,62/tahun; jalur 2,83/tahun	-	Sedang	Aritmetika; data Renja Tw I
7	RT akses sanitasi aman (%)	3,19	12,52	9,33	3,10 → 3,19	Tetap di 3,19; kesenjangan 9,33	≥2,33/tahun; jalur 2,01/tahun	-	Tinggi	Aritmetika; data Renja Tw I

Sumber: pengolahan penyusun dari SK Metodologi, Renstra, PK, tabel IKU Tw I, dan Cetakan Evaluasi RENJA SKPD.

Tiga dasar dibedakan: proyeksi berbasis tren historis (belum dapat dibuat), proyeksi berdasarkan rencana kerja dan kapasitas anggaran (belum dapat dibuat karena jadwal kontrak dan target triwulanan tidak ada), dan target resmi (pembanding). Risiko Tinggi ada pada Indeks Infrastruktur, SAKIP, dan sanitasi aman. Penyebabnya adalah kebutuhan kenaikan yang melebihi jalur rencana, tidak adanya kenaikan SAKIP sejak 2025, dan 43% kenaikan rencana Indeks Infrastruktur 2026 berasal dari komponen Konektivitas yang tidak memiliki indikator pada PK Bidang. Kemantapan Jalan dan Irigasi berisiko Sedang tetapi bergantung pada anggaran yang hampir belum terserap pada Triwulan I.

III.1.5 Strategi Korektif terhadap Indikator yang Berisiko Tidak Mencapai Target

Strategi disusun untuk indikator berisiko Tinggi dan Kritis serta indikator Sedang yang bergantung pada anggaran besar yang belum terserap. Penanggung jawab mengikuti PK 2026 (jabatan dan nama). Strategi tidak mengubah target; bila kalibrasi diperlukan, dasarnya diuraikan dan harus melalui reviu perencanaan bersama pihak terkait.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.8 Matriks Strategi Korektif Indikator Berisiko

No.	Indikator Berisiko	Kondisi Aktual	Target yang Belum Tercapai	Penyebab Utama	Strategi Korektif	Program/Kegiatan Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu	Keluaran	Indikator Keberhasilan	Mekanisme Pemantauan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Infrastruktur (seri SK)	61,89; 97,73% target 2026; 83,32% target 2030	Target 2026 63,33; sisa ke 2030: 12,39 poin	Kenaikan rencana 2026 terbesar ada pada Konektivitas (±43%) dan Irigasi (±24%), tetapi PK Bidang tidak memuat indikator konektivitas/internet/listrik; keluaran konstruksi Tw I nol; nilai komponen Tw I tidak tersedia	Memetakan setiap komponen indeks ke bidang dan program; menetapkan pemilik data komponen Konektivitas; memprioritaskan komponen berbobot besar (Air Minum 0,27; Sanitasi 0,22; Irigasi 0,16)	Jalan (1.03.10); Irigasi (1.03.02.2.02); SPAM; Air Limbah	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.; koordinasi bidang teknis	Tw II 2026 (pemetaan); Renja 2027	Peta komponen–program–pemilik data; nilai komponen Tw I	Seluruh 7 komponen memiliki pemilik dan nilai per triwulan	Reviu triwulanan komponen; peringatan dini bila komponen turun
2	Nilai Implementasi SAKIP	72; 98,58% target 2026	Target 2026 73,04; sisa ke 2030: 8,12 poin	Tidak berubah sejak evaluasi 2025; kebutuhan kenaikan melampaui jalur; ketepatan pelaporan belum optimal (Monev Tw II)	Menutup temuan evaluasi SAKIP sebelumnya menurut komponen berbobot terbesar; PIC dan checklist pelaporan; menautkan target bidang pada IKU	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD (1.03.01.2.01)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.; Sekretaris Dinas	Tw II–Tw IV 2026	Matriks tindak lanjut evaluasi; checklist pelaporan	100% rekomendasi evaluasi terjadwal; laporan triwulanan tepat waktu	Rapat monev bulanan; peringatan dini keterlambatan
3	RT akses sanitasi aman (%)	3,19; 71,36% target 2026	Target 2026 4,47; sisa ke 2030: 9,33 poin	Pagu SPALD berbasis masyarakat Rp2,28 miliar belum terserap (0/100 m³/hari); sedot lumpur tinja baru 147 RT dari 1.000; informasi lanjutan: dokumen standar teknis IPLT belum ada (Monev)	Mempercepat pengadaan SPALD; menetapkan jadwal L2T2; melengkapi dokumen teknis IPLT	Sistem Air Limbah (1.03.05.2.01) beranggaran PK Rp2,29 miliar	Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.; UPT Air Limbah	Tw II–Tw IV 2026; target L2T2 pada Renja 2027	Kontrak SPALD; dokumen teknis IPLT; laporan volume bulanan	100 m³/hari terbangun; 1.000 RT terlayani	Laporan bulanan UPT; evaluasi triwulanan
4	Kemantapan Jalan	76,87; 100,1% target 2026	Sisa ke 2030: 4,30 poin	Anggaran Jalan PK Rp27,61 miliar baru terserap Rp19,37 juta (0,07%); keluaran 0 km rekonstruksi dan 0 m jembatan; Renja memuat Rp63,86 miliar (2,3 kali PK)	Mengawal pengadaan dan kontrak paket besar; menyelaraskan target Renja dengan pagu PK; survei dan uji tanah sebelum DED	Rekonstruksi Jalan (...0059); Penggantian Jembatan (...0057); Pemeliharaan Rutin (...0051)	Sekretaris Dinas (selaku PJ Bina Marga), Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Tw II–Tw IV 2026	Kontrak dan jadwal per paket; laporan progres mingguan	16 km rekonstruksi; 150 m jembatan; 10 km rutin (target Renja 2026)	Monitoring fisik mingguan; deviasi fisik–keuangan bulanan
5	Kondisi Irigasi (%)	89,53; turun 5,59 poin dari 2025	Sisa ke 2030: 10,47 poin	Keluaran 0 km pada rehabilitasi, peningkatan, dan OP; realisasi Rp6,53 juta (0,24% PK); Renja Rp4,00 miliar vs PK Rp2,76 miliar	Menetapkan prioritas jaringan berdasarkan kondisi; jadwal OP; menyelaraskan target dengan pagu PK	Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (1.03.02.2.02)	Kepala Bidang SDA, Munawardi, S.T., M.T.	Tw II–Tw IV 2026	Database kondisi jaringan; jadwal OP	Rehabilitasi 28,5 km dan OP 26,4 km (target Renja)	Laporan progres bulanan
6	Drainase dan Permukiman	Tidak ada data; program tidak beranggaran 2026 (PK)	Target 2026 21,46% dan 100%	Program tidak dianggarkan	Memasukkan ke bahan Renja 2027 dengan target terkalibrasi, bila tetap menjadi tanggung jawab DPUPR	Program 1.03.06 dan 1.03.07	Perencanaan bersama bidang terkait (Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.)	Renja 2027	Usulan program dan target	Keputusan penganggaran	Reviu Renja

Sumber: pengolahan penyusun dari SK Metodologi, PK 2026, Cetakan Evaluasi RENJA SKPD Tw I 2026, dan Laporan Monev (konteks lanjutan). Target keluaran adalah target tahunan Renja.

Dapat dilaksanakan pada 2026: nomor 1 (pemetaan), 2, 3, 4, dan 5. Diteruskan ke Renstra berikutnya: target sanitasi aman dan komponen Konektivitas pada Indeks Infrastruktur, serta kalibrasi target Drainase dan Permukiman. Kalibrasi target Irigasi dan Kemantapan Jalan (target 2026 lebih rendah dari realisasi 2025) diajukan hanya melalui reviu perencanaan dengan data historis yang diverifikasi.

III.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dinilai dari hubungan sumber daya dengan keluaran dan kontribusi pada indikator, bukan dari serapan saja. Serapan rendah tidak otomatis efisien, serapan tinggi tidak otomatis efektif, dan sisa anggaran belum dapat disebut penghematan sebelum penyebabnya diverifikasi. Pada Triwulan I yang tampak umumnya tahap awal pelaksanaan, bukan efisiensi.

III.1.6.1 Analisis Efisiensi Anggaran

Rumus: % realisasi keuangan = Realisasi ÷ Pagu × 100%, dihitung terhadap pagu PK (riil) dan terhadap pagu Renja (pembanding). Realisasi fisik (indeks keluaran) = rata-rata (realisasi keluaran Tw I ÷ target keluaran 2026), maksimum 100%, atas indikator keluaran subkegiatan bertarget >0. Deviasi = % fisik − % keuangan (terhadap PK). Target fisik memakai target tahunan karena target triwulanan tidak ada.

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Anggaran per Program Triwulan I Tahun 2026

No.	Program	Pagu PK (Riil)	Realisasi Keuangan	% thd Pagu PK	% thd Pagu Renja	Target Fisik	Realisasi Fisik (indeks)	Deviasi Fisik–Keuangan (poin)	Keluaran/Output	Kontribusi terhadap IKU	Hasil Analisis Efisiensi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemda	Rp22.940.166.863	Rp5.113.404.468	22,29%	15,55%	100%	19,97%	-2,32	Gaji ASN 500 orang/bulan (target PK 117); 1 laporan evaluasi; 4 laporan keuangan (target 15); 0 gedung kantor; 0 peralatan	Tidak langsung (kapasitas penyelenggaraan)	77,4% dari seluruh realisasi (Gaji ASN saja 54,9%). Serapan belanja wajib tidak menunjukkan efisiensi. Pengadaan Gedung Kantor terserap Rp825 juta dengan keluaran 0 unit.	Verifikasi dasar pembayaran pengadaan; reviu target gaji
2	Program Pengelolaan SDA	Rp2.755.824.162	Rp6.528.900	0,24%	0,16%	100%	0,00%	-0,24	0 km rehabilitasi, peningkatan, dan OP irigasi; 0 dokumen dukungan teknis	Kondisi Irigasi; Indeks Infrastruktur	Keluaran 0 dan serapan nyaris nol: tahap awal/keterlambatan, bukan penghematan.	Percepat pengadaan; jadwal OP
3	Program Sistem Penyediaan Air Minum	Rp4.986.825.000	Rp0	0,00%	0,00%	100%	0,00%	+0,00	0 SR (target 1.000)	Akses air minum; Indeks Infrastruktur	Belum ada pelaksanaan; anggaran belum terserap.	Selesaikan persyaratan dan kontrak
4	Program Sistem Air Limbah	Rp2.291.839.610	Rp3.150.000	0,14%	0,14%	100%	7,35%	+7,21	147 RT tersedot lumpur tinja (1.000); 0 m³/hari SPALD (100)	Sanitasi aman; Indeks Infrastruktur	Keluaran sedot lumpur 14,7% dengan biaya Rp3,15 juta; SPALD belum berjalan.	Percepat SPALD; ukur biaya per RT
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.601.326.160	Rp1.425.873.250	30,99%	7,94%	100%	41,67%	+10,68	100 dokumen PBG/SLF (120); 0 dari 1 bangunan strategis dipelihara	Bangunan baik; PBG/SLF	Indeks fisik berasal dari penerbitan PBG/SLF (pagu Renja Rp5,59 juta, realisasi Rp0). Belanja Rp1,43 miliar pada pemeliharaan gedung strategis belum menghasilkan keluaran, sehingga deviasi positif menyesatkan.	Rinci komponen belanja Rp1,43 miliar
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp27.609.777.563	Rp19.372.500	0,07%	0,03%	100%	0,00%	-0,07	0 km rekonstruksi (16); 0 m jembatan (150); 0 km rutin (10)	Kemantapan Jalan; Indeks Infrastruktur	Program terbesar pada PK (42,1%) tetapi terserap 0,07%; belum ada keluaran. Bukan efisiensi.	Kawal pengadaan dan kontrak
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp33.975.220	Rp1.365.000	4,02%	4,02%	100%	0,00%	-4,02	0 orang dilatih (50)	Tenaga kerja konstruksi ahli	Terserap awal tanpa keluaran; nilai kecil.	Jadwalkan pelatihan
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp314.723.000	Rp35.134.666	11,16%	11,16%	100%	51,33%	+40,17	162 layanan KKPR (300); 6 kasus (target 2); 0 Perda RTRW	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Layanan KKPR 54% target dengan biaya Rp162.000; RTRW belum selesai walau Rp29,97 juta terserap.	Pertahankan layanan; percepat RTRW
	Total	Rp65.534.457.578	Rp6.604.828.784	10,08 %	5,13%	–	–	–	–	–	Di luar Penunjang: Rp1.491.424.316 (3,50% dari pagu PK Rp42,59 miliar). Drainase, Permukiman, Penataan B&L tidak beranggaran.	–

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD Tw I 2026 (realisasi dan keluaran); PK 2026 Rev.1 (pagu riil). Persentase terhadap pagu Renja sebagai pembanding simpangan perencanaan.

Terhadap pagu PK, serapan Triwulan I mencapai 10,08% (terhadap Renja: 5,13%). Perbedaan ini menunjukkan simpangan perencanaan: pagu Renja yang hampir dua kali PK membuat serapan tampak jauh lebih rendah. Serapan terkonsentrasi pada belanja penunjang dan pemeliharaan gedung. Program Jalan, yang terbesar pada PK (42,1%), hampir tidak terserap. Pola ini sejalan dengan tahap persiapan kontrak, tetapi penyebabnya pada Triwulan I belum terdokumentasi (hipotesis), sehingga sisa anggaran belum dapat disebut penghematan.

III.1.6.2 Analisis Efisiensi sampai Tingkat Program dan Kegiatan Prioritas

Prioritas dipilih dari data: nilai pagu besar, kontribusi pada IKU, dan selisih fisik–keuangan yang mencolok. Karena PK hanya memuat pagu tingkat program dan DPA yang diunggah tidak lengkap, pagu subkegiatan ditampilkan menurut Renja dengan pembanding PK/DPA bila tersedia.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.10 Matriks Efisiensi Program/Kegiatan Prioritas Triwulan I Tahun 2026

Program/Kegiatan Prioritas	IKU yang Didukung	Pagu (Renja vs PK/DPA)	Realisasi Keuangan	Progres Fisik	Keluaran	Penilaian Efisiensi	Faktor Penyebab	Dampak terhadap Kinerja	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rekonstruksi Jalan (1.03.10.2.01.0059)	Kemantapan Jalan; Indeks Infrastruktur	Renja Rp58.177.782.634; PK program Jalan Rp27.609.777.563; DPA Jalan hanya Rutin	Rp225.000 (0,0004% Renja)	0 dari 16 km (0%)	0 km	Belum dapat dinilai; serapan hampir nol = pekerjaan belum berjalan	Tahap persiapan/pengadaan (dugaan); Renja memuat 2,3 kali PK; informasi lanjutan: penyesuaian desain dan mutu beton (Monev Tw II)	Kemantapan Jalan berisiko bila konstruksi menumpuk di semester II	Selaraskan target dengan PK; kawal kontrak; verifikasi satuan Rp225.000
Penggantian Jembatan (...0057)	Kemantapan Jalan; Indeks Infrastruktur	Renja Rp4.668.790.000 (bagian dari program Jalan)	Rp187.500 (0,004%)	0 dari 150 m (0%)	0 m	Belum dapat dinilai	Sondir awal Jembatan Aik Bual tidak sesuai kondisi tanah (Monev Tw II)	Risiko keterlambatan akhir tahun	Uji tanah sebelum DED; monitoring mingguan
Pemeliharaan Rutin Jalan (...0051)	Kemantapan Jalan	Renja Rp1.000.003.995 = DPA kegiatan Jalan	Rp18.960.000 (1,90%)	0 dari 10 km (0%)	0 km	Serapan kecil tanpa keluaran; belum efisien	Lima dari 18 ruas rusak berat; material belum standar (Monev Tw III)	Pemeliharaan tidak menahan penurunan mantap	Uji mutu material; penanganan ruas rusak berat
Pemeliharaan dan Pemeriksaan Berkala Gedung Strategis (1.03.08.2.01.0018)	Bangunan gedung kondisi baik	Renja Rp17.955.873.160; DPA kegiatan Gedung Rp4.595.741.160; PK program Rp4.601.326.160	Rp1.425.873.250 (7,94% Renja; 31,0% PK program)	0 dari 1 bangunan (0%)	0 bangunan	Belanja tanpa keluaran terukur; belum dapat dinilai efisien	Belum terdokumentasi (hipotesis: pembayaran awal)	Capaian bangunan baik 100% perlu dijaga	Rinci komponen belanja; target keluaran bertahap
Pengadaan Gedung Kantor (1.03.01.2.07.0009)	Penunjang (tidak langsung)	Renja Rp11.559.662.888; DPA kegiatan Pengadaan BMD Rp3.630.040.000	Rp824.968.900 (7,14% Renja; 22,7% DPA kegiatan)	0 dari 2 unit (0%)	0 unit	Belanja tanpa keluaran; belum dapat dinilai	Belum terdokumentasi; Renja 3,2 kali DPA	Tidak langsung	Verifikasi dasar pembayaran dan simpangan Renja–DPA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (1.03.01.2.02.0001)	Penunjang (kapasitas SDM)	Renja Rp15.499.887.051; PK Adm. Keuangan Rp15.658.207.091	Rp3.629.441.247 (23,42% Renja; 23,18% PK)	500 orang/bulan vs target PK 117	500	Serapan mendekati 3/12 (25%); target keluaran perlu direviu	Selisih 1,58–1,82 poin dari 25% belum dijelaskan; target 117 tidak sebanding	Tidak langsung	Reviu target keluaran
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan (1.03.03.2.01.0032)	Akses air minum layak; Indeks Infrastruktur	Renja Rp7.286.825.000; DPA/PK SPAM Rp4.986.825.000	Rp0 (0%)	0 dari 1.000 SR (0%)	0 SR	Belum dapat dinilai	RISPAM belum selesai; syarat DAK belum terpenuhi (Monev Tw II)	Risiko target SR tidak tercapai	Selesaikan RISPAM; jadwal kontrak; selaraskan Renja–PK
Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (1.03.02.2.02)	Kondisi Irigasi; Indeks Infrastruktur	Renja Rp3.995.824.162; PK program SDA Rp2.755.824.162	Rp6.528.900 (0,16% Renja; 0,24% PK)	0 dari 28,5 km rehab (0%)	0 km	Belum dapat dinilai	EFAKSI 5%; OP belum dilaksanakan (Monev Tw II)	Kondisi Irigasi berisiko tidak naik	Prioritas rehabilitasi berbasis kondisi
Pembangunan SPALD Berbasis Masyarakat (1.03.05.2.01.0023)	Sanitasi aman	Renja Rp2.280.980.000 = DPA	Rp0 (0%)	0 dari 100 m³/hari (0%)	0 m³/hari	Belum dapat dinilai	IPLT belum memiliki dokumen standar teknis; L2T2 belum optimal (Monev)	Risiko pada sanitasi aman	Dokumen teknis; kontrak
Penetapan RTRW (...2.01.0011) dan Pelaksanaan KKPR (...2.03.0004)	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	RTRW Rp189.888.000 dan KKPR Rp62.000.000 (= DPA = PK)	Rp29.971.666 (15,78%); Rp162.000 (0,26%)	RTRW 0 dari 1; KKPR 162 dari 300 (54%)	0 Perda; 162 layanan	KKPR: keluaran 54% dengan biaya 0,26% pagu; RTRW belum dapat dinilai	RTRW menunggu pembahasan lintas sektor (Monev Tw II–III)	Kesesuaian 100% perlu dijaga tanpa RTRW baru	Dokumen pendukung; rekonsiliasi KKPR (V9)

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD Tw I 2026; PK 2026 Rev.1; DPA 2026; Laporan Monev (keterangan "Monev", Tw II–III, bukan bukti Tw I).

III.1.6.3 Analisis Faktor Penyebab Efisiensi dan Inefisiensi

Tabel 3.11 Faktor Penyebab dan Status Pembuktian

Faktor	Bukti dalam Sumber	Status
1	2	3
Simpangan pagu Renja terhadap PK/DPA	Renja Rp128,64 miliar vs PK Rp65,53 miliar; Jalan 2,3 kali, Gedung 3,9 kali, Pengadaan Gedung Kantor 3,2 kali DPA	Fakta (data); penyebab: perlu konfirmasi
Pola belanja konstruksi tertunda	Program teknis di luar Penunjang terserap 3,5% dari pagu PK; subkegiatan konstruksi berkeluaran 0	Fakta (data); penyebab: hipotesis tahap pengadaan/kontrak
Kesiapan teknis dan desain	Sondir Aik Bual tidak sesuai kondisi tanah; penyesuaian mutu beton (Monev Tw II)	Terverifikasi untuk 2 paket pada Tw II; belum tentu mewakili Tw I
Pengadaan dan kapasitas pelaksana	Pelaksana mengerjakan beberapa paket bersamaan; produksi aspal belum terjadwal (Monev Tw III)	Terverifikasi pada Tw III
Dokumen dan regulasi	RISPAM, RTRW/RDTR menunggu lintas sektor (Monev Tw II–III)	Terverifikasi pada Tw II–III
Pelaporan dan data	Perbedaan angka KKPR (162 vs 299); nominal realisasi kecil; operator lalai mengisi laporan (Monev Tw II)	Fakta (selisih data); penyebab: hipotesis
Penetapan target	Target 2026 irigasi dan kemantapan jalan lebih rendah dari realisasi 2025; target gaji ASN 117	Fakta (data); penyebab: perlu konfirmasi

Faktor lain yang diminta (perubahan harga, produktivitas peralatan, koordinasi antarbidang) tidak dapat dinilai karena tidak ada data Triwulan I.

III.1.6.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Analisis efisiensi sumber daya manusia diarahkan pada kesesuaian antara jumlah pegawai, distribusi tugas, beban kerja, kompetensi, biaya pengembangan kapasitas, dan keluaran pelayanan. Data jumlah serta distribusi pegawai, analisis beban kerja, dan biaya pelatihan secara lengkap belum tersedia sehingga produktivitas pegawai dan kecukupan SDM belum dapat dinilai secara menyeluruh.

Berdasarkan data yang tersedia, pelatihan tenaga kerja konstruksi memiliki pagu Rp33.975.220 dan realisasi Rp1.365.000 atau 4,02%. Keluaran yang dilaporkan masih 0 orang dari target 50 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa target keluaran pelatihan belum terealisasi pada periode pelaporan. Rendahnya realisasi belum cukup untuk menyimpulkan penyebabnya, sehingga perlu diperiksa jadwal pelatihan, kesiapan penyelenggara, proses pengadaan jasa, dan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja.

Sementara itu, gaji dan tunjangan ASN terealisasi sekitar Rp3,63 miliar dengan keluaran yang dilaporkan sebesar 500 orang/bulan, sedangkan target PK tercatat 117. Kedua angka tersebut belum dapat dibandingkan secara langsung sebelum dipastikan apakah target 117 merupakan jumlah pegawai, rata-rata pegawai per bulan, atau satuan keluaran lainnya.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

a. Memvalidasi jumlah pegawai aktif, distribusi pegawai per bidang/UPTD, serta beban kerja.

b. Menyelaraskan definisi, satuan, dan periode pengukuran keluaran gaji dan tunjangan ASN.

c. Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan berdasarkan jadwal, realisasi keuangan, jumlah peserta, dan kompetensi yang dihasilkan.

d. Mengembangkan ukuran produktivitas berupa keluaran per pegawai sesuai jenis tugas, dengan tetap memperhatikan mutu dan kompleksitas pekerjaan.

Dengan demikian, hasil sementara menunjukkan adanya kesenjangan realisasi pelatihan, tetapi belum cukup untuk menetapkan bahwa alokasi SDM atau belanja pegawai tidak efisien.

III.1.6.5 Analisis Efisiensi Teknologi Informasi

Analisis efisiensi teknologi informasi dilakukan untuk menilai kontribusi sistem informasi terhadap percepatan proses kerja, peningkatan akurasi data, pengurangan pekerjaan berulang, dan penurunan biaya administrasi. Data mengenai waktu penyusunan laporan, ketepatan input, jumlah koreksi, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta waktu yang dihemat belum tersedia.

Bukti tidak langsung menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat tata kelola data, khususnya perbedaan angka layanan KKPR antara 162 dan 299, nominal realisasi yang tidak lazim, serta ketidakseragaman seri target Indeks Infrastruktur. Temuan ini merupakan indikasi masalah konsistensi data, bukan bukti bahwa aplikasi tertentu menjadi penyebabnya.

Untuk meningkatkan kemampuan evaluasi pada triwulan berikutnya, DPUPR perlu menerapkan pengukuran berikut.

Aspek	Indikator yang diusulkan	Cara pengukuran
1	2	3
Ketepatan waktu	Persentase laporan masuk sesuai tenggat	Jumlah laporan tepat waktu dibandingkan seluruh laporan wajib.
Akurasi data	Jumlah koreksi data per triwulan	Menghitung koreksi berdasarkan log perubahan dan berita acara rekonsiliasi.
Konsistensi data	Persentase kesesuaian data antarsumber	Membandingkan register layanan, aplikasi, dokumen keuangan, dan laporan kinerja.
Efisiensi proses	Waktu rata-rata penyusunan laporan	Membandingkan waktu kerja sebelum dan sesudah penggunaan sistem.
Deteksi dini	Jumlah deviasi fisik–keuangan yang teridentifikasi sebelum evaluasi akhir	Menggunakan hasil pemantauan berkala dan catatan tindak lanjut.

Penerapan ukuran tersebut perlu disertai penetapan pemilik data, operator, pejabat pemeriksa, standar waktu pembaruan, dan mekanisme koreksi. Klaim efisiensi teknologi informasi baru dapat dibuat setelah tersedia data pembanding yang konsisten.

III.1.6.6 Analisis Efisiensi melalui Inovasi Pelayanan

Penilaian efisiensi inovasi pelayanan memerlukan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi, khususnya dari sisi waktu penyelesaian, biaya pelayanan, ketepatan waktu, mutu keluaran, dan kepuasan pengguna. Data pembanding tersebut belum tersedia.

Layanan KKPR dilaporkan menghasilkan 162 layanan dengan realisasi Rp162.000. Angka ini perlu direkonsiliasi dengan sumber lain yang mencatat 299 layanan serta diverifikasi terhadap dokumen penerimaan dan ketentuan tarif yang berlaku. Nominal tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai biaya pelayanan maupun bukti efisiensi tanpa memastikan definisi dan sumber datanya.

Aspek evaluasi	Indikator yang diusulkan	Bukti yang perlu disiapkan
1	2	3
Produktivitas layanan	Jumlah layanan selesai per periode	Register layanan yang tervalidasi.
Ketepatan waktu	Persentase layanan selesai sesuai standar waktu	Tanggal permohonan dan penyelesaian setiap layanan.
Efisiensi biaya	Biaya operasional per layanan selesai	Biaya tenaga kerja, administrasi, sistem, dan komponen relevan lainnya.
Kualitas pelayanan	Persentase layanan yang memenuhi persyaratan pada pemeriksaan pertama	Catatan verifikasi dan pengembalian berkas.
Dampak inovasi	Perubahan waktu dan biaya sebelum–sesudah inovasi	Data dasar dan data setelah penerapan dengan metode perbandingan yang konsisten.

Sampai data pembanding tersedia, inovasi pelayanan tidak dapat dinyatakan telah menghasilkan penghematan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah mempertahankan kesinambungan layanan, merekonsiliasi data, menetapkan indikator pelayanan, dan mengumpulkan data dasar untuk evaluasi berikutnya.

III.1.6.7 Pemanfaatan Hasil Analisis Efisiensi untuk Perencanaan dan Penganggaran

Tabel 3.12 Pemanfaatan Hasil Analisis Efisiensi untuk Renja dan RKA

No.	Temuan Efisiensi/Inefisiensi	Program/Kegiatan Terkait	Implikasi terhadap IKU	Tindakan Perbaikan	Usulan Perencanaan Tahun Berikutnya	Implikasi Anggaran	Penanggung Jawab	Waktu Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Renja melampaui PK/DPA (Rp63,10 miliar; Jalan, Gedung, Penunjang, SPAM, SDA)	Seluruh program yang bersimpangan	Serapan dan target keluaran terdistorsi bila pagu Renja tidak sama dengan anggaran riil	Rekonsiliasi pagu Renja–PK–DPA	Renja disusun dari plafon anggaran yang ditetapkan; target keluaran mengikuti pagu riil	Tidak perlu penambahan; penyelarasan	Perencanaan (Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.)	Tw II 2026; Renja 2027
2	Serapan program konstruksi hampir nol	Jalan; SDA; SPAM; SPALD	Kemantapan Jalan; Kondisi Irigasi; Indeks Infrastruktur	Kawal pengadaan dan jadwal kontrak	Kalender pengadaan memperhitungkan persiapan dan produksi material; kesiapan DED sebelum anggaran	Evaluasi pagu bila paket tidak siap	Bidang Bina Marga, SDA, Cipta Karya (lihat PK)	Tw II 2026; Renja 2027
3	Belanja tanpa keluaran	1.03.08.2.01.0018; 1.03.01.2.07.0009	Bangunan gedung kondisi baik	Verifikasi dasar pembayaran	Target keluaran bertahap per triwulan	Reviu pagu setelah verifikasi	Sekretaris Dinas; Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Tw II 2026
4	Komponen Konektivitas tidak memiliki indikator bidang	Indeks Infrastruktur	Komponen dengan pengaruh terbesar (±43% kenaikan 2026)	Menetapkan pemilik data dan kegiatan pendukung	Memuat indikator/kegiatan komponen pada PK dan Renja	Usulan bersyarat; belum disetujui	Perencanaan; Sekretaris Dinas	Renja 2027
5	Target 2026 yang perlu direviu (irigasi, kemantapan jalan, gaji ASN)	Irigasi; Jalan; Penunjang	IKU terkait	Reviu target	Kalibrasi target melalui mekanisme resmi	Tidak langsung	Perencanaan; Bappeda	Renja 2027
6	Keluaran layanan baik dengan biaya kecil (KKPR)	1.03.12.2.03.0004	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pertahankan layanan; rekonsiliasi angka	Pertahankan alokasi; ukur biaya per layanan	Pertahankan	Kabid Penataan Ruang	Berkelanjutan

Seluruh implikasi anggaran adalah usulan analisis, bukan keputusan yang telah disetujui.

III.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pemetaan memakai berkas Evaluasi Renja untuk realisasi dan PK untuk tujuan, sasaran, dan target. Kontribusi program terhadap indikator dinyatakan potensial karena data komponen Indeks Infrastruktur Triwulan I belum ada. Kesamaan waktu antara perubahan indikator dan pelaksanaan program tidak dijadikan bukti sebab-akibat.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.13 Matriks Kontribusi Program/Kegiatan terhadap IKU

No.	Tujuan/Sasaran	IKU yang Didukung	Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target (2026)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Kontribusi terhadap IKU	Faktor Pendorong/Penghambat	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur; IKLI; Kemantapan Jalan	Penyelenggaraan Jalan (PK Rp27,61 miliar)	Rekonstruksi, Penggantian Jembatan, Pemeliharaan Rutin, Survei, Perencanaan Teknis	Km/m jalan dan jembatan	16 km; 150 m; 10 km; 500 km survei (2026)	0%	Rp19.372.500 (0,07% PK)	Potensial; belum ada keluaran	Penghambat: persiapan kontrak/desain; Renja melebihi PK	Kawal kontrak; selaraskan Renja–PK
2	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur; Kondisi Irigasi	Pengelolaan SDA (PK Rp2,76 miliar)	Rehabilitasi, Peningkatan, OP Irigasi	Km jaringan	28,5; 31,67; 26,4 km	0%	Rp6.528.900 (0,24% PK)	Potensial; belum ada keluaran	Penghambat: EFAKSI, OP belum berjalan (Monev)	Percepat; prioritas jaringan
3	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (Air Minum 0,27); akses air minum	SPAM (PK Rp4,99 miliar)	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Sambungan Rumah	1.000 SR	0%	Rp0 (0%)	Potensial; belum ada keluaran	Penghambat: RISPAM (Monev)	Selesaikan RISPAM; kontrak
4	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (Sanitasi 0,22); sanitasi aman	Air Limbah (PK Rp2,29 miliar)	SPALD, penyedotan lumpur tinja, IPLT	m³/hari; RT dilayani	100 m³/hari; 1.000 RT	7,35% (indeks)	Rp3.150.000 (0,14% PK)	Parsial: 147 RT disedot (14,7%)	Penghambat: dokumen IPLT, L2T2 (Monev)	Percepat SPALD
5	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Bangunan gedung baik; PBG/SLF	Penataan Bangunan Gedung (PK Rp4,60 miliar)	Pemeliharaan Gedung Strategis; Penerbitan PBG/SLF	Bangunan; dokumen	1 bangunan; 120 dokumen	41,67% (indeks)	Rp1.425.873.250 (31,0% PK)	Parsial: 100 dokumen PBG/SLF (83,3%)	Pendorong: layanan PBG berjalan; Penghambat: belanja tanpa keluaran	Rinci komponen belanja
6	S.1.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang (PK Rp314,7 juta)	RTRW; KKPR; Pengendalian	Layanan; dokumen; kasus	300 layanan; 1 Perda; 2 kasus	51,33% (indeks)	Rp35.134.666 (11,16% PK)	Mendukung: 162 layanan KKPR (54%)	Penghambat: RTRW menunggu lintas sektor (Monev)	Pertahankan KKPR; percepat RTRW
7	T.1 Akses Infrastruktur Berkualitas	Tenaga kerja konstruksi ahli	Jasa Konstruksi (PK Rp34,0 juta)	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Orang dilatih	50 orang	0%	Rp1.365.000 (4,02% PK)	Belum ada keluaran	Belum terdokumentasi	Jadwal pelatihan
8	S.1.3 Akuntabilitas Kinerja	SAKIP; Pencapaian IKU PD	Penunjang (PK Rp22,94 miliar)	Perencanaan; Evaluasi Kinerja; Administrasi	Dokumen/laporan	Beragam	19,97% (indeks)	Rp5.113.404.468 (22,29% PK)	Mendukung operasional; kontribusi SAKIP belum terbukti	Pendorong: belanja rutin; Penghambat: pelaporan	PIC dan checklist
9	S.1.1 (Drainase, Permukiman, Penataan B&L)	Drainase; Permukiman; Penataan B&L	Tiga program tidak beranggaran 2026 (PK)	–	–	–	n/a	Rp0	Tidak terdukung anggaran 2026	Fakta dokumen PK	Reviu penganggaran
10	S.1.1 (komponen Konektivitas, Internet, Listrik)	Indeks Infrastruktur	Tidak ada program/indikator bidang pada PK	–	–	–	n/a	n/a	Tidak teridentifikasi	Pengaruh terbesar pada kenaikan rencana 2026 (Konektivitas ±43%)	Tetapkan pemilik data

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD Tw I 2026; PK 2026; SK Metodologi (bobot komponen); Laporan Monev (konteks).

1. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Layanan KKPR (162 layanan, 54% target tahunan), penerbitan PBG/SLF (100 dokumen, 83,3%), dan penyedotan lumpur tinja (147 RT, 14,7%) adalah keluaran yang terbukti. Kontribusi pada Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan kepatuhan PBG/SLF bersifat langsung menurut definisi indikator, namun belum dibuktikan kuantitatif.

2. Program/kegiatan yang belum memberikan kontribusi optimal. Jalan, SDA, SPAM, SPALD, dan Pelatihan Konstruksi belum menghasilkan keluaran. Kesenjangan terbesar ada pada Jalan (PK Rp27,61 miliar, keluaran 0). Karena target Triwulan I tidak ada, ini disebut tahap awal, bukan kegagalan.

3. Program/kegiatan yang berisiko menghambat target akhir Renstra. Rekonstruksi dan Penggantian Jembatan (Kemantapan Jalan), SPAM Perluasan, Irigasi (turun 5,59 poin dari 2025), dan SPALD (sanitasi aman). Memerlukan percepatan pengadaan, kesiapan desain, dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, komponen Konektivitas pada Indeks Infrastruktur tidak memiliki program pada PK.

4. Keterkaitan dengan strategi korektif. Rekomendasi sejalan dengan Tabel 3.7 dan 3.8: Indeks Infrastruktur, SAKIP, dan sanitasi aman (risiko Tinggi) serta Drainase dan Permukiman (Kritis) menjadi prioritas, sedangkan IKLI memerlukan validasi basis hitung sebelum dikaitkan dengan program.

III.2 ANALISIS KETERPADUAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kinerja. IKLI dan Kesesuaian sudah berada pada atau di atas target 2030. Indeks Infrastruktur (83,32% target 2030) dan SAKIP (89,87%) masih tertinggal, dan lonjakan IKLI perlu divalidasi.

Pelaksanaan. Keluaran terbukti hanya pada layanan (KKPR, PBG/SLF, sedot lumpur) dan administrasi. Seluruh subkegiatan konstruksi besar berkeluaran 0 pada Triwulan I. Hal ini konsisten dengan tahap persiapan, tetapi perlu target triwulanan agar dapat dinilai.

Anggaran dan sumber daya. Serapan 10,08% dari pagu PK (Rp65,53 miliar) dan 5,13% dari pagu Renja (Rp128,64 miliar). Simpangan Renja terhadap PK sebesar Rp63,10 miliar adalah temuan perencanaan tersendiri. Belanja Rp1,43 miliar pada pemeliharaan gedung dan Rp825 juta pada pengadaan gedung kantor belum disertai keluaran. Efisiensi SDM, TI, dan inovasi belum dapat dinilai.

Keberlanjutan. Indikator baik yang perlu penguatan: IKLI (validitas data) dan Kesesuaian (RTRW/RDTR). Anggaran terserap tanpa keluaran: gedung. Kegiatan berpagu yang belum terserap dan berpotensi menghambat kinerja: Rekonstruksi

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Jalan, Penggantian Jembatan, SPAM Perluasan, Rehabilitasi Irigasi, dan SPALD. Kegiatan yang berpeluang meningkatkan keluaran tanpa tambahan sumber daya: KKPR dan PBG/SLF. Efisiensi tidak disamakan dengan pengurangan belanja; sasarannya adalah keluaran dan mutu layanan.



III.3 RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN II DAN PERENCANAAN TAHUN BERIKUTNYA

Tabel 3.14 Matriks Rencana Tindak Lanjut

No.	Permasalahan/Temuan	Indikator atau Program Terkait	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Bukti Penyelesaian	Mekanisme Monitoring	Implikasi terhadap Renja/RKA Tahun Berikutnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Seri target Indeks Infrastruktur berbeda (SK draft vs PK/Renstra)	Indeks Infrastruktur	Menetapkan SK dan menyelaraskan PK/Renstra	Tw II 2026 (selesai pada Tw II)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	SK bernomor; PK/Renstra terselaraskan	Rapat monev bulanan	Penyesuaian target pada Renja 2027
2	Basis hitung IKLI dan komponen Indeks Infrastruktur Tw I belum terdokumentasi	IKLI; Indeks Infrastruktur	Menyusun dokumen hitung dan nilai komponen Tw I	Tw II 2026 (selesai pada Tw II)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Dokumen hitung	Reviu triwulanan	Validitas basis data IKU
3	Simpangan pagu Renja terhadap PK/DPA (Rp63,10 miliar)	Seluruh program	Rekonsiliasi Renja–PK–DPA; penjelasan selisih	Tw II 2026 (selesai pada Tw II)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Berita acara rekonsiliasi	Verifikasi keuangan triwulanan	Renja 2027 disusun dari plafon riil
4	Serapan konstruksi hampir nol	Jalan; SDA; SPAM; SPALD	Kawal pengadaan dan kontrak; jadwal per paket	Dipantau sampai akhir 2026	Sekretaris Dinas (selaku PJ Bina Marga), Muhamad Sarjan, S.T., M.T.; Kepala Bidang SDA, Munawardi, S.T., M.T.; Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Kontrak dan progres mingguan	Deviasi fisik–keuangan bulanan	Kalender pengadaan Renja 2027
5	Belanja tanpa keluaran (gedung)	1.03.08.2.01.0018; 1.03.01.2.07.0009	Rinci komponen belanja dan dasar pembayaran	Tw II 2026 (selesai pada Tw II)	Sekretaris Dinas; Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Rincian belanja	Verifikasi keuangan	Reviu pagu
6	Angka KKPR (162 vs 299) dan nominal realisasi kecil	KKPR; Rekonstruksi Jalan	Rekonsiliasi data dan verifikasi satuan	Tw II 2026 (selesai pada Tw II)	Kepala Bidang Penataan Ruang, Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.; Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Berita acara rekonsiliasi	Rekonsiliasi triwulanan	Kualitas data
7	Komponen Konektivitas/Internet/Listrik tidak memiliki pemilik data pada PK	Indeks Infrastruktur	Menetapkan pemilik data dan kegiatan pendukung; konfirmasi ke perangkat daerah terkait	Dipantau sampai akhir 2026; Renja 2027 (perlu koordinasi di luar DPUPR)	Sekretaris Dinas; Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Surat/BA koordinasi	Koordinasi triwulanan	Usulan indikator dan kegiatan 2027
8	RTRW/RDTR dan RISPAM menunggu lintas sektor	Penataan Ruang; SPAM	Menyiapkan dokumen pendukung dan menindaklanjuti ke instansi terkait	Perlu keputusan pihak di luar DPUPR	Kepala Bidang Penataan Ruang, Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.; Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Risalah pembahasan	Pemantauan bulanan	Urutan penetapan dalam jadwal perencanaan

No.	Permasalahan/Temuan	Indikator atau Program Terkait	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Bukti Penyelesaian	Mekanisme Monitoring	Implikasi terhadap Renja/RKA Tahun Berikutnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Target 2026 yang perlu direviu (irigasi, kemantapan jalan, gaji ASN)	Irigasi; Jalan; Penunjang	Reviu dan kalibrasi target	Renja 2027 (perencanaan tahun berikutnya)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.; Bappeda	Berita acara reviu target	Reviu Renja	Perubahan target melalui mekanisme resmi

Penanggung jawab mengikuti PK 2026; tenggat resmi ditetapkan pimpinan.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

III.4 PENUTUP DAN DATA YANG BELUM TERSEDIA

Laporan Triwulan I 2026 menunjukkan bahwa capaian IKU berada pada atau mendekati target tahunan, tetapi keluaran konstruksi nyaris nol dan serapan baru 10,08% dari pagu PK. Temuan perencanaan yang menonjol adalah Renja yang melebihi anggaran riil sebesar Rp63,10 miliar dan seri target Indeks Infrastruktur yang belum seragam. Kesimpulan tentang keberhasilan atau kegagalan belum dapat ditarik sebelum target triwulanan ditetapkan dan data yang diperlukan dikonfirmasi.

Data yang belum tersedia dan karenanya tidak dianalisis: nilai komponen IKLI dan Indeks Infrastruktur Triwulan I, target triwulanan fisik/keuangan per paket, DPA lengkap, data 2021–2023, serta data SDM, teknologi informasi, dan inovasi layanan 2026. Setelah data tersebut tersedia, III.1.2, III.1.4, dan III.1.6.4–III.1.6.6 dapat diperdalam.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

BAB IV
PENUTUP



IV.1 SIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah pada Triwulan I Tahun 2026 (Januari–Maret) dengan target menurut Perjanjian Kinerja (PK) 2026 Revisi 1, tiga dari empat Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai atau melampaui target tahunan dan Nilai SAKIP mendekati target, tetapi keluaran konstruksi masih nyaris nol dan serapan anggaran baru 10,08% dari pagu PK. Karena target triwulanan belum ditetapkan terpisah, Triwulan I diperlakukan sebagai pengendalian dini; kesimpulan tentang keberhasilan atau kegagalan belum dapat ditarik sebelum target triwulanan ditetapkan dan data yang diperlukan dikonfirmasi.

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI, I.T.1) terealisasi 65,70 dari target 2026 sebesar 52,68 (124,72%) menurut PK Revisi 1, 111,39% terhadap target RPJMD (58,98), atau 121,87% terhadap target SK Metodologi (53,91). Terhadap target RPJMD 2029 (68,47) capaian baru 95,95%. Kenaikan 13,02 poin dari baseline 52,68 jauh di atas kenaikan 2024–2025 (+1,03) dan belum dapat dikaitkan dengan program karena keluaran konstruksi belum ada; basis hitung perlu diverifikasi.
2. Indeks Infrastruktur (I.S.1) terealisasi 61,89 dari target 2026 sebesar 60,89 (101,64%), lebih 1,00 poin menurut PK Revisi 1. Terhadap target RPJMD (58,55) capaian 105,70%, tetapi terhadap target SK Metodologi (63,33) capaian 97,73% (kurang 1,44 poin), sehingga status tercapai atau belum bergantung pada seri target yang dipakai. Terhadap target RPJMD 2029 (65,86) capaian baru 93,97% dengan sisa 3,97 poin.
3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (I.S.2) tercapai 100%, sama dengan target 2026 dan target akhir Renstra. Layanan KKPR baru 162 dari target 300 layanan (54%), dan RTRW/RDTR belum ditetapkan (0 dokumen pada Triwulan I).

4. Nilai Implementasi SAKIP (I.S.3) sebesar 72 dari target 2026 sebesar 73,04 (98,58%), kurang 1,04 poin. Nilai ini merupakan hasil evaluasi resmi Inspektorat sehingga tidak berubah antartriwulan sampai evaluasi berikutnya.
5. Indikator outcome program: dari 11 indikator berformula, 6 berada pada atau di atas target 2026 dan 5 di bawahnya. Yang paling tertinggal adalah RT akses sanitasi aman (71,36%), fasilitas pemda ber-EBT (46,36%), dan konsumsi listrik per kapita (76,00%). Drainase, Permukiman, dan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli tidak memiliki data Triwulan I.
6. Anggaran dan keluaran: realisasi keuangan Rp6.604.828.784 atau 10,08% dari pagu PK Rp65.534.457.578 (5,13% dari pagu Renja Rp128,64 miliar). Program di luar Penunjang baru terserap 3,50%, dan Program Penyelenggaraan Jalan (42,1% pagu PK) terserap 0,07%. Keluaran terbukti hanya pada layanan KKPR, penerbitan PBG/SLF (100 dokumen), dan penyedotan lumpur tinja (147 RT).
7. Temuan perencanaan: pagu Renja melampaui PK/DPA sebesar Rp63,10 miliar, sedangkan pagu PK Rp65,53 miliar hanya 43,8% dari pagu indikatif RPJMD 2026 untuk urusan ini (Rp149,60 miliar) dan tiga program berpagu pada RPJMD (Drainase, Permukiman, serta Penataan Bangunan dan Lingkungannya) tidak beranggaran pada PK; target 2026 IKLI dan Indeks Infrastruktur berbeda antara PK Revisi 1 (52,68 dan 60,89), RPJMD (58,98 dan 58,55), dan SK Metodologi (53,91 dan 63,33), dengan target IKLI pada PK lebih rendah daripada RPJMD; serta periode RPJMD dan Renstra adalah 2025–2029 sehingga dokumen yang masih memuat 2030 sebagai akhir periode perlu diseragamkan.

Secara keseluruhan, kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa capaian indikator belum dapat dibaca sebagai hasil program: keluaran konstruksi hampir nol, sedangkan angka IKU dipengaruhi basis hitung dan seri target yang perlu diselaraskan. Prioritas Triwulan II–IV 2026 adalah mengubah tahap persiapan menjadi keluaran terukur, merekonsiliasi Renja–PK–DPA, dan menetapkan target triwulanan sehingga kinerja dapat dinilai sejak awal tahun.

IV.2 SARAN/REKOMENDASI

1. Rekonsiliasi Renja–PK–DPA dan Penyeragaman Seri Target
    - Rekonsiliasi pagu Renja, PK, DPA, dan pagu indikatif RPJMD (selisih Renja–PK Rp63,10 miliar; pagu PK hanya 43,8% dari RPJMD) dengan berita acara, dan menyusun Renja 2027 dari plafon anggaran riil.
    - Menetapkan seri target 2026 yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 (Perda Nomor 4 Tahun 2025), atau mendokumentasikan dasar penyimpangannya, dan

menyeragamkan Laporan Triwulan I, PK, Renstra, dan SK Metodologi, termasuk periode 2025–2029.

- Mendokumentasikan basis hitung IKLI dan nilai komponen Indeks Infrastruktur Triwulan I. Penanggung jawab: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; target Triwulan II 2026.

2. Percepatan Pengadaan dan Pengawalan Kontrak Program Konstruksi
   - Mengawal pengadaan dan kontrak paket Jalan, Irigasi, SPAM, dan SPALD dengan jadwal per paket, monitoring fisik mingguan, dan pemantauan deviasi fisik–keuangan bulanan.
   - Menetapkan target triwulanan fisik dan keuangan per paket agar capaian dapat dinilai sejak awal tahun.
   - Menjaga alokasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pemeliharaan rutin jalan agar penurunan kondisi irigasi (5,59 poin dari 2025) tidak berlanjut dan kemantapan jalan terjaga.
3. Verifikasi Belanja tanpa Keluaran dan Rekonsiliasi Data Layanan
   - Merinci komponen belanja pemeliharaan gedung strategis (Rp1,43 miliar) dan pengadaan gedung kantor (Rp825 juta) yang belum disertai keluaran.
   - Merekonsiliasi angka layanan KKPR (162 dan 299) dan memverifikasi satuan nominal realisasi.
   - Mereviu target keluaran gaji dan tunjangan ASN (500 orang/bulan terhadap target PK 117).
4. Penguatan Pemantauan Kinerja Berjenjang dan Sistem Informasi Kinerja (SI PRAJA)
   - Tahun 2025 telah dilakukan perancangan desain sistem SI PRAJA; Tahun 2026 difokuskan pada pematangan aplikasi, integrasi indikator hingga level kegiatan dan sub kegiatan, serta dashboard monitoring.
   - Mengukur kontribusi sistem informasi melalui ketepatan waktu laporan, jumlah koreksi data, kesesuaian data antarsumber, dan deteksi dini deviasi fisik–keuangan.
   - Evaluasi berkala berbasis laporan kinerja internal per bidang, rapat monitoring yang terdokumentasi dalam Berita Acara/Notula, dan penelusuran deviasi indikator hingga level aktivitas.
5. Percepatan Dokumen Perencanaan Lintas Sektor
   - Menyiapkan dokumen pendukung dan menindaklanjuti ke instansi terkait agar RTRW/RDTR dan RISPAM dapat ditetapkan, karena keduanya menunggu

pembahasan lintas sektor dan menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang serta pelayanan air minum.

6. Penetapan Pemilik Data Komponen Indeks dan Reviu Target
    - Menetapkan pemilik data dan kegiatan pendukung komponen Konektivitas, Internet, dan Listrik pada Indeks Infrastruktur (sekitar 43% kenaikan rencana 2026) yang belum memiliki indikator pada PK bidang.
    - Mereviu target 2026 irigasi, kemantapan jalan, dan gaji ASN, serta memasukkan program Drainase dan Permukiman dalam bahan Renja 2027, melalui mekanisme reviu perencanaan yang resmi.
7. Kelengkapan Lampiran dan Bukti Dukung Laporan Kinerja
    - Melampirkan pengukuran kinerja sesuai format Perbup Nomor 84 Tahun 2024, PK dan perubahan PK 2026 (Revisi 1), SK Tim Penyusun, SOP penyusunan laporan kinerja, dan bukti dukung data indikator dengan sumber yang jelas, sebagaimana catatan hasil reviu Inspektorat atas laporan kinerja sebelumnya.
    - Menyajikan perbandingan realisasi dengan target jangka menengah serta standar nasional dan provinsi bila tersedia.

Dengan percepatan pengadaan dan pengawalan kontrak, rekonsiliasi Renja–PK–DPA, serta penguatan data dan pemantauan kinerja berjenjang melalui SI PRAJA, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat mengubah capaian awal tahun menjadi keluaran terukur pada Triwulan II–IV 2026 dan menjaga arah menuju target akhir Renstra dengan tata kelola yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

BAB V TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU INSPEKTORAT – LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Bab ini menelaah tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah atas Catatan Hasil Reviu Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan dasar Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 (Januari–Maret) dan Perjanjian Kinerja (PK) 2026 Revisi 1.

Sumber data dan kedudukannya. (1) Catatan Hasil Reviu Inspektorat atas laporan 2025; (2) Laporan Triwulan I 2026 dan Bab I, II, dan IV; (3) PK 2026 Revisi 1 untuk Eselon II, III, dan IV, yang selaras dengan Renstra periode 2025–2029; (4) RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025) sebagai dokumen induk perencanaan. Penilaian dalam bab ini adalah analisis penyusun atas dokumen tersebut, bukan pernyataan resmi Inspektorat. Status Sebagian atau Belum berarti bukti penyelesaian belum tampak pada dokumen yang ditelaah, bukan bahwa pekerjaannya tidak dilakukan.

V.1 Dasar dan Pendekatan Penelaahan

Reviu Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 700/01/Rev/INSP/2026 tanggal 2 Februari 2026 dengan rujukan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024, dan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan data kinerja.

Pendekatan. Penelaahan memakai pendekatan auditor perencana. Setiap catatan Inspektorat (kriteria) dibandingkan dengan kondisi pada Laporan Triwulan I 2026 dan PK 2026 Revisi 1, dinilai statusnya sebagai Terpenuhi, Sebagian, atau Belum, kemudian diturunkan menjadi tindakan, penanggung jawab, dan bukti penyelesaian. Triwulan I tidak memiliki target triwulanan terpisah, sehingga sebagian rekomendasi baru dapat dipenuhi penuh pada laporan tahunan.

V.2 Tindak Lanjut atas Ketersediaan Dokumen

Inspektorat mencatat delapan dokumen pada Tabel 1 catatan hasil reviu, dengan enam di antaranya belum dilampirkan pada laporan 2025. Tabel 5.1 menunjukkan posisi masing-masing dokumen pada Laporan Triwulan I 2026.

Tabel 5.1 Tindak Lanjut Ketersediaan Dokumen Laporan Kinerja

No.	Dokumen (catatan Inspektorat)	Posisi pada Laporan Triwulan I 2026	Penilaian	Tindak lanjut
1	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Triwulan I 2026 disusun dengan struktur Bab I–V.	Terpenuhi	Pertahankan; laporan tahunan 2026 memakai struktur yang sama.
2	Indikator Kinerja Utama	Empat IKU disajikan pada Bab II dan Tabel 3.3; target pada Tabel 3.3 belum sama dengan PK 2026 Revisi 1 (F4).	Sebagian	Samakan target dengan PK Revisi 1 dan lampirkan daftar IKU 2026 beserta metodologinya.
3	Pengukuran Kinerja format Perbup 84/2024	Tabel 3.3 memuat target, realisasi, capaian, status, dan sumber data; kesesuaian kolom dengan format lampiran Perbup belum terbukti.	Sebagian	Cocokkan kolom Tabel 3.3 dengan format Perbup 84/2024 dan lampirkan lembar pengukuran kinerja.
4	Perjanjian Kinerja	PK 2026 Revisi 1 untuk Eselon II, III, dan IV tersedia (31 Januari 2026) dan menjadi dasar Bab II; salinan pada lampiran laporan belum terbukti.	Sebagian	Lampirkan PK Eselon II beserta PK Eselon III dan IV yang telah ditandatangani.
5	Perubahan Perjanjian Kinerja	Revisi 1 tidak memuat uraian perubahan, dan PK awal tidak dilampirkan; tanggal tetap 31 Januari 2026 meski sumber program memakai Evaluasi Renja TW II 2026 (F12).	Sebagian	Sajikan tabel sebelum–sesudah (indikator, target, pagu), tanggal penetapan Revisi 1, dan dasar perubahan menurut PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.
6	SK Tim Penyusun Laporan Kinerja	Tidak ada informasi pada laporan.	Belum	Tetapkan dan lampirkan SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2026.
7	SOP Penyusunan Laporan Kinerja	Tidak ada informasi pada laporan.	Belum	Tetapkan SOP penyusunan laporan (termasuk jadwal pengumpulan data bidang) dan lampirkan.
8	Bukti dukung data	Sumber data disebut pada setiap tabel, tetapi bukti dukung belum dilampirkan; dokumen hitung IKLI dan nilai komponen Indeks Infrastruktur Triwulan I belum tersedia.	Sebagian	Lampirkan Cetakan Evaluasi Renja, tabel IKU, DPA, serta dokumen hitung IKLI dan komponen indeks; beri nomor lampiran pada tiap sumber data.

Ringkasan: 1 Terpenuhi, 5 Sebagian, 2 Belum. Sumber: Catatan Hasil Reviu Inspektorat (Tabel 1), PK 2026 Revisi 1, dan telaah atas Laporan Triwulan I 2026.

V.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Substansi Laporan

Delapan rekomendasi substansi Inspektorat dipetakan pada bagian laporan Triwulan I yang menanganinya (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Substansi

No.	Rekomendasi Inspektorat	Penanganan pada Laporan Triwulan I 2026	Penilaian	Sisa tindak lanjut
1	Melengkapi dokumen sesuai sistematika (Tabel 1 dan 2)	Sistematika Bab I–V diikuti; kelengkapan lampiran pada Tabel 5.1.	Sebagian	Selesaikan butir 2–8 Tabel 5.1.
2	Menyajikan uraian perubahan PK	Bab II memuat ringkasan PK 2026 Revisi 1 (Tabel 2.8 dan Tabel 2.9–2.15).	Sebagian	Rinci perubahan terhadap PK awal dan tanggal Revisi 1 (F12).
3	Memakai rumus dan interval capaian sesuai Perbup 84/2024	Rumus Capaian = Realisasi ÷ Target × 100% dan skala Perbup dipakai pada III.1.1.	Sebagian	Verifikasi batas interval skala terhadap teks Perbup (F2).
4	Membandingkan realisasi dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dari data valid yang dapat ditelusuri	III.1.2 dan Tabel 3.5 membandingkan 2024, 2025, dan Triwulan I 2026; data 2021–2023 tidak tersedia.	Sebagian	Lengkapi sel kosong Tabel 3.5 (F3) dan cari data 2021–2023 bila ada.
5	Membandingkan realisasi dengan target jangka menengah	III.1.3 (Tabel 3.6) dan III.1.4 (Tabel 3.7) membandingkan dengan target akhir Renstra dan memuat skenario kebutuhan kenaikan.	Terpenuhi dengan catatan	Bandingkan dengan target RPJMD 2029 (IKLI 68,47; Indeks Infrastruktur 65,86), seragamkan periode 2025–2029, dan hitung ulang target akhir serta sisa waktu (F1, F14).
6	Membandingkan dengan standar nasional dan target provinsi	Tidak ada perbandingan pada laporan Triwulan I.	Belum	Tambahkan pembanding nasional dan provinsi untuk indikator yang memiliki standar, atau nyatakan bahwa standar tidak tersedia.
7	Menyajikan besaran efisiensi per program dan mereviu perhitungan	III.1.6 dan Tabel 3.9–3.12 memuat serapan terhadap pagu PK dan Renja, deviasi fisik–keuangan, dan faktor penyebab; efisiensi tidak disamakan dengan serapan.	Sebagian	Tambahkan biaya per keluaran untuk layanan yang sudah berkeluaran (KKPR, PBG/SLF, penyedotan lumpur tinja) dan hitung efisiensi akhir tahun (F9).
8	Menyajikan realisasi anggaran yang mengacu pada APBD Perubahan	Laporan memakai PK 2026 Revisi 1 dan Evaluasi Renja Triwulan I; label APBD murni atau perubahan belum dinyatakan.	Belum	Nyatakan dasar anggaran pada setiap tabel keuangan; laporan tahunan memakai pagu setelah perubahan.

Ringkasan: 1 Terpenuhi dengan catatan, 5 Sebagian, 2 Belum.

V.4 Hasil Penelaahan Konsistensi dan Risiko

Selain menanggapi catatan Inspektorat, penelaahan lintas dokumen menemukan butir yang berpotensi menjadi catatan reviu berikutnya bila tidak diselesaikan sebelum dokumen difinalkan. Perhitungan total pada Tabel 3.9 telah diuji ulang: realisasi Rp6.604.828.784 terhadap pagu PK Rp65.534.457.578 menghasilkan 10,08%, dan persentase per program sesuai. Pagu delapan program pada PK 2026 Revisi 1 juga berjumlah sama dengan pagu pada Tabel 3.9, dan pagu 11 program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada RPJMD 2026 berjumlah Rp149.597.451.000, sama dengan total yang tercantum.

Tabel 5.3 Temuan Konsistensi Data dan Risiko

No.	Kondisi	Risiko	Tingkat	Tindakan
F1	Periode RPJMD dan Renstra adalah 2025–2029 (Perda Nomor 4 Tahun 2025), tetapi tabel target RPJMD memuat kolom 2026 sampai 2030, sehingga Laporan Triwulan I dan SK Metodologi memakai “target 2030” dan sisa waktu 2027–2030, dan catatan sumber PK 2026 Revisi 1 menyebut Renstra 2025–2030.	Akhir periode (2029) dan proyeksi 2030 tercampur; perbandingan target jangka menengah dan skenario proyeksi memakai tahun akhir yang keliru.	Tinggi	Pakai 2029 sebagai akhir periode, tampilkan 2030 hanya sebagai proyeksi di luar periode, dan hitung ulang sisa waktu (2027–2029) pada Tabel 3.6–3.7.
F2	Skala capaian ditulis ≤50%, 51–65%, 66–75%, 76–90%, dan >91%; nilai di antara batas (misalnya 90,5%) tidak masuk kategori.	Kategori status tidak dapat ditentukan untuk nilai tertentu dan dapat dicatat sebagai ketidaksesuaian dengan Perbup.	Sedang	Samakan dengan teks Perbup 84/2024 dan tulis batas kontinu.
F3	Tabel 3.5 mengosongkan IKLI 2024 dan 2025 serta Indeks Infrastruktur 2024, padahal selisih +1,03 dicantumkan dan Tabel 3.7 menyebut 51,65 → 52,68.	Data pembanding tidak dapat ditelusuri; selisih tanpa nilai dasar.	Sedang	Isi nilai dasar dan sumbernya, atau hapus selisih.
F4	Target 2026 memiliki tiga seri. IKLI: 58,98 (RPJMD), 52,68 (PK Revisi 1), 53,91 (SK/Laporan Triwulan I). Indeks Infrastruktur: 58,55 (RPJMD), 60,89 (PK Revisi 1), 63,33 (SK). Capaian Triwulan I (IKLI 65,70; Indeks 61,89) menjadi IKLI 111,39%, 124,72%, atau 121,87%, dan Indeks Infrastruktur 105,70%, 101,64%, atau 97,73%.	Status tercapai atau belum tercapai berubah menurut dokumen yang dipakai (Indeks Infrastruktur hanya belum tercapai pada seri SK); Bab III dan Bab IV dapat bertentangan dengan PK yang ditandatangani.	Tinggi	Tetapkan satu seri target yang selaras dengan RPJMD, revisi Tabel 3.3 dan Bab IV, dan dokumentasikan alasan bila PK atau SK berbeda dari RPJMD.
F5	IKLI naik 13,02 poin pada Triwulan I tanpa keluaran konstruksi.	Validitas basis hitung dipertanyakan; capaian tinggi rawan dianggap tidak andal.	Tinggi	Dokumentasikan basis hitung dan hasil survei sebelum dilaporkan sebagai capaian.
F6	Pagu Renja Rp128,64 miliar melampaui PK Rp65,53 miliar (selisih Rp63,10 miliar).	Serapan dan target keluaran terdistorsi (10,08% terhadap PK, 5,13% terhadap Renja).	Tinggi	Rekonsiliasi Renja–PK–DPA dengan berita acara.
F7	Target tidak sebanding atau lebih rendah dari realisasi tahun lalu: gaji ASN 500 terhadap 117, KKPR 162 terhadap 299, target irigasi 88,69% (2025: 95,12%), dan kemantapan jalan 76,79% (2025: 76,88%).	Capaian tampak tinggi karena target rendah sehingga kurang menantang.	Sedang	Reviu target melalui mekanisme perencanaan yang resmi.
F8	Lima indikator outcome bernilai sama dengan realisasi 2025.	Nilai tahun lalu dapat terbaca sebagai capaian Triwulan I.	Sedang	Beri label nilai sementara dan perbarui setelah data triwulan tersedia.
F9	Tabel 3.9 memuat serapan dan deviasi fisik–keuangan, belum rasio keluaran terhadap biaya.	Permintaan Inspektorat atas besaran efisiensi baru terpenuhi sebagian.	Sedang	Tambahkan biaya per keluaran untuk layanan berkeluaran.
F10	Laporan memuat informasi Monev Triwulan II–III sebagai konteks.	Pencampuran periode bila label hilang.	Rendah	Pertahankan pemisahan dan label “Monev” pada setiap keterangan.
F11	Target 2026 PK Revisi 1 untuk IKLI (52,68) dan Indeks Infrastruktur (60,89) sama persis dengan nilai dasar 2025 pada Tabel 3.5, sehingga tidak memuat kenaikan.	Target tampak tidak menantang, atau terjadi salah kolom saat disalin dari Renstra.	Sedang	Cocokkan dengan kolom tahun 2026 pada Renstra; bila memang demikian, jelaskan dasar penetapannya.
F12	PK 2026 Revisi 1 bertanggal 31 Januari 2026, tetapi catatan sumbernya menyebut Evaluasi Renja-SKPD (E60) TW II 2026.	Tanggal penetapan revisi tidak sesuai dengan dasar datanya, sehingga keabsahan dan urutan revisi dipertanyakan.	Sedang	Cantumkan tanggal penetapan Revisi 1 yang sebenarnya serta nomor dan tanggal PK awal.
F13	Sebagian indikator Eselon IV pada PK Revisi 1 bertanda (*) sebagai usulan penyusun yang wajib divalidasi Pihak Kedua; jabatan Kepala UPTD Jasa Konstruksi tidak terisi sehingga Kepala Sub Bagian Tata Usaha menanggung penugasan.	Indikator yang belum disepakati dapat dipakai sebagai dasar penilaian; kewenangan penandatangan lemah.	Sedang	Validasi melalui dialog kinerja sebelum penandatanganan final dan tetapkan pejabat untuk UPTD Jasa Konstruksi.

No.	Kondisi	Risiko	Tingkat	Tindakan
F14	Target 2026 PK Revisi 1 tidak selaras dengan RPJMD: IKLI 52,68 terhadap 58,98 (lebih rendah 6,30 poin dan sama dengan nilai dasar 2025), Indeks Infrastruktur 60,89 terhadap 58,55 (lebih tinggi 2,34 poin). Target akhir RPJMD 2029: IKLI 68,47 dan Indeks Infrastruktur 65,86 (Triwulan I baru 95,95% dan 93,97%).	Renstra dan PK seharusnya menjabarkan RPJMD; target yang lebih rendah dari RPJMD membuat capaian tampak lebih tinggi dan dapat dicatat sebagai ketidakselarasan perencanaan.	Tinggi	Selaraskan target Renstra dan PK dengan RPJMD, atau dokumentasikan dasar penyimpangan dan persetujuan pimpinan.
F15	Pagu PK 2026 Revisi 1 Rp65,53 miliar hanya 43,8% dari pagu indikatif RPJMD 2026 untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rp149,60 miliar). Tiga program berpagu pada RPJMD tidak beranggaran pada PK: Drainase (Rp1,52 miliar), Permukiman (Rp7,11 miliar), dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Rp2,20 miliar).	Target outcome RPJMD tetap dibebankan pada program yang pagunya jauh lebih kecil atau nol, sehingga ketercapaian target jangka menengah tidak realistis.	Tinggi	Jelaskan dasar penyesuaian pagu terhadap RPJMD dan kaitkan dengan usulan Renja 2027 serta perubahan RPJMD bila diperlukan.
F16	Penamaan indikator tidak seragam: RPJMD menulis “Indeks Infrastruktur” pada tabel target dan “Indeks Infrastruktur Wilayah” pada tabel outcome, SK menulis “Berbobot”, dan PK menulis “Indeks Infrastruktur”. RPJMD memuat Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah (2026: 77,06), sedangkan IKU Dinas adalah Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (73,04).	Indikator tingkat daerah dan tingkat perangkat daerah dapat tertukar saat dibandingkan dengan target RPJMD.	Rendah	Seragamkan nama indikator dan beri keterangan tingkat (daerah atau perangkat daerah) pada setiap tabel.

Sumber: Laporan Triwulan I 2026, PK 2026 Revisi 1, dan Catatan Hasil Reviu Inspektorat. Capaian pada F4 dihitung penyusun: Realisasi ÷ Target × 100% (IKLI 65,70; Indeks Infrastruktur 61,89).

V.5 Penilaian Kesiapan dan Rencana Tindak Lanjut

Struktur dan analisis Laporan Triwulan I telah menjawab sebagian besar catatan Inspektorat, terutama perbandingan dengan target jangka menengah, analisis penyebab, dan analisis efisiensi. Risiko tertinggi bukan pada narasi, melainkan pada keselarasan target antardokumen dan terhadap RPJMD (F1, F4, F14, F15), keandalan data dasar (F5, F6), dan kelengkapan lampiran bukti dukung. Hal-hal ini menentukan apakah laporan dapat diberi keyakinan terbatas pada reviu berikutnya.

Tabel 5.4 Rencana Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu

No.	Tindakan	Penanggung jawab	Target waktu	Bukti penyelesaian
1	Menyeragamkan periode Renstra 2025–2029 pada Bab I–V, Laporan Triwulan I, SK Metodologi, dan catatan sumber PK (F1)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Sebelum dokumen final	Dokumen yang seragam pada periode 2025–2029
2	Menetapkan satu seri target 2026 yang selaras dengan RPJMD dan merevisi Tabel 3.3 serta Bab IV (F4, F11, F14, F16)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Sekretaris Dinas, Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Sebelum dokumen final	Tabel 3.3 dan Bab IV sesuai PK Revisi 1
3	Meninjau pagu PK terhadap pagu indikatif RPJMD dan program tanpa pagu (F15)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Sekretaris Dinas	Sebelum dokumen final; Renja 2027	Penjelasan tertulis dan usulan Renja 2027
4	Memverifikasi tanggal dan uraian perubahan PK Revisi 1 (F12)	Sekretaris Dinas; Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sebelum dokumen final	Tabel sebelum–sesudah dan tanggal penetapan
5	Mendokumentasikan basis hitung IKLI dan komponen indeks (F5)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sebelum dokumen final	Dokumen hitung dan hasil survei
6	Rekonsiliasi Renja–PK–DPA (F6)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sebelum dokumen final; Renja 2027	Berita acara rekonsiliasi
7	Melengkapi lampiran: pengukuran kinerja, PK dan perubahan PK, SK Tim, SOP, bukti dukung (Tabel 5.1)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Sekretaris Dinas	Sebelum dokumen final	Lampiran bernomor dan terhubung ke sumber data
8	Memverifikasi interval skala capaian dan melengkapi Tabel 3.5 (F2, F3)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sebelum dokumen final	Tabel 3.3 dan 3.5 telah direvisi
9	Memvalidasi indikator Eselon IV bertanda (*) dan menetapkan pejabat UPTD Jasa Konstruksi (F13)	Sekretaris Dinas; Kepala Dinas, Ir. Lalu Rahadian, M.Si	Sebelum dokumen final	PK Eselon IV tervalidasi dan SK penugasan
10	Menambahkan pembanding standar nasional dan provinsi serta menyatakan dasar anggaran, memakai pagu perubahan pada laporan tahunan (Rekomendasi 6 dan 8)	Kepala Bidang terkait; Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan tahunan 2026	Tabel pembanding dan catatan dasar anggaran
11	Menambahkan ukuran biaya per keluaran dan mereviu target yang tidak sebanding (F7, F9)	Sekretaris Dinas; Kepala Bidang terkait	Renja 2027	Tabel efisiensi dan berita acara reviu target

Penanggung jawab mengikuti PK 2026 Revisi 1; tenggat resmi ditetapkan pimpinan.

V.6 Simpulan Bab

Dari delapan dokumen yang dicatat Inspektorat, satu terpenuhi, lima sebagian, dan dua belum. Dari delapan rekomendasi substansi, satu terpenuhi dengan catatan, lima sebagian, dan dua belum. Penyelesaian prioritas adalah penyelarasan target dan pagu dengan RPJMD, penyeragaman periode dan target 2026 pada seluruh dokumen, rekonsiliasi Renja–PK–DPA, dan kelengkapan lampiran bukti dukung.